

e-news letter

JULI li 2020

**PKSPARLEMEN**

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



**Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T**

---

Perlindungan Usaha Pada  
RUU Cipta Kerja

**DISABILITAS  
BUTUH SUPPORT  
NEGARA**



# Menghadirkan Kepedulian Dimasa Pandemi

Bagaimana kabar semua? Kita ingin tahu adakah yang berubah pasca peristiwa marah-marah terakhir yang terjadi beberapa pekan lalu

Kita berharap semua baik-baik saja, bahkan jauh lebih baik dibandingkan pekan-pekan awal saat menghadapi pandemik.

Tercatat : Marah sudah, Perppu sudah. Koalisi dominan dimiliki. Lalu mau apalagi? Namun fakta tak sesuai dengan apa yang kita sangka. Ternyata dominasi tidak selamanya mampu menghadirkan kebijakan yang baik, malah seringkali hasilkan negasi dan sensasi. Hasilnya jauh dari kata sukses, karena yang terdengar banyak nada sumbang menyeruak di sejumlah sisi.

Tersebutlah bantuan sosial (Bansos) yang bermasalah dengan update data yang buruk. Angka covid 19 yang melonjak naik dan terus konsisten mendapuk Indonesia sebagai negara paling terpapar di ASEAN.

Himbauan perlunya sense of crisis tidak banyak yang berubah dan tidak signifikan dalam pusran publik.

Angka sekedar kata-kata. Pemerintah 'gas pol' untuk urusan yang tidak berhubungan dengan sense of crisis public kebanyakan. Asik dengan program yang tidak menyentuh urusan publik, ditambah survei-survei politik yang berjibaku digaris depan. RUU Cipta Kerja diterabas melewati waktu normal, semua masukan dan pandangan disisihkan. Tentu tidak bisa dibiarkan model relasi dan pola kerja demikian, fungsi pengawasan mutlak dilakukannya. Tidak ada kata terlambat untuk

mencermati RUU yang minor bagi publik, seraya tekun menghadirkan solusi dari sejumlah aturan dan pasal yang krusial. Dalam kerja politik "bawa perasaan" dan "cari perhatian" memang seringkali sulit dipisahkan, dia hanya akan diuji saat melewati waktu apakah konsisten antara kata dan Tindakan.

Di situasi seperti ini wajah pengambil kebijakan seperti kehilangan ruh dan rasa. Terlebih kepada komponen masyarakat yang sudah terlalu lama mereka tertinggal dan hampir dilupakan dalam pusran diskusi kebangsaan. Karena menganggap membahas mereka bukan yang utama dan dianggap 'bisa lain waktu', diantaranya para Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan rekan-rekan disabilitas. Kita bersyukur Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi usulan Baleg. RUU Perlindungan PRT selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPR.

Fraksi PKS menyampaikan perlindungan PRT merupakan bagian tidak terpisahkan dari perlindungan oleh negara terhadap warga negaranya yaitu memberikan perlindungan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh tiap warga negara. Fraksi PKS memandang hadirnya UU yang mengatur tentang perlindungan terhadap PRT merupakan bentuk kehadiran negara dalam



memberikan perlindungan terhadap seluruh warganya.

Dari rancangan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang disodorkan Pemerintah ironisnya berisi text yang terlalu sering dibuat tebal atau bold untuk para pemilih modal dan kapital besar. Karpet merah dibentang dari mulai hulu hingga hilir RUU untuk pihak-pihak yang punya daya dan membawa lebaran Investasi. Nampak biasa saja jika diteropong atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, namun menjadi masalah saat dia telisik dari sisi kemanusiaan. Karena telah menghapus sejumlah catatan sejarah penting, tentang menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejak awal FPKS mengingatkan pemerintah agar memasukkan upaya memenuh hak-hak para penyandang disabilitas terkait persoalan membangun usaha ke dalam pembah-

asan RUU Omnibuslaw Cipta Kerja. Apalagi ke depannya akan banyak ketentuan teknis yang diatur lewat regulasi turunan semacam Peraturan Pemerintah. Para penyandang disabilitas yang memiliki usaha mandiri ini umumnya memiliki usaha yang masih berkategori usaha skala mikro dan kecil sehingga sangat membutuhkan support negara. Namun ironisnya kondisi disabilitas mereka yang justru kerap dijadikan alasan hingga mereka sulit mendapat izin usaha, akses pembiayaan apalagi pemberian fasilitas, insentif dan pendampingan perkembangan usaha.

Perlahan sangkarut luka mulai menganga hingga ke lapisan terbawah, paling tergerus keras kepada mereka yang selama ini sering dianggap sebelah mata. Hingga sampai gelap mata hingga akhirnya mengalhalkan segala cara untuk sekedar memuaskan kuasa.

Humas FPKS DPR RI

**Agar Fokus Tangani Covid-19**

# HNW Desak Presiden & DPR Cabut RUU HIP dari Prolegnas

“Polemik, saling curiga, dan demo-demo tersebut akan berakhir apabila RUU HIP ini dicabut dari Prolegnas. Jadi dengan itu maka Negara bisa menenteramkan Rakyat, agar semuanya bisa berkontribusi dan kembali fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan

**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

Jakarta (09/07) — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, kembali mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR untuk menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan mencabutnya dari Prolegnas.

“Sebagaimana aspirasi banyak pihak, Presiden dan DPR tidak bisa menghentikan kegaduhan politik di tengah semakin mengkhawatirkannya pandemi covid-19 di Indonesia,” ujar Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI ini.

Bahkan, lanjut Hidayat, sejak beberapa hari terakhir ini, Indonesia sudah menjadi Negara dengan jumlah korban terbanyak se-ASEAN.

“Juru bicara Negara untuk penanganan covid-19 sudah umumkan bahwa prosentase kematian akibat covid-19 di Indonesia adalah yang tertinggi se-Dunia”, imbuhnya.

HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa dalam kondisi itu, RUU HIP telah menghadirkan polemik dan demo dimana-mana, yang membuat kegaduhan di masyarakat Indonesia yang lagi terkena darurat kesehatan

akibat pandemi covid-19.

“Karena banyak sekali konten mendasar yang kontroversial, yang dinilai publik bisa men-down grade Pancasila sebagai dasar negara, mengaburkan Pancasila yang disepakati oleh PPKI dan termaktub dalam Pembukaan UUD 45 dengan memunculkan Trisila & Ekasila, serta mengaburkan sila Ke-Tuhanan YME menjadi Ketuhanan saja, atau Ketuhanan yang berkebudayaan,” ungkap Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini.

HNW melanjutkan, selain tidak diterimanya usulan FPKS dan beberapa Fraksi lainnya untuk memasukkan TAP MPRS no XXV/1966 ke dalam konsideran mengingat, sampai RUU itu dibawa ke Rapat Paripurna DPR, dengan mengabaikan Fraksi PKS dan Fraksi PD yang tidak ikut menandatangani pengusulan RUU tersebut ke Rapat Paripurna DPR.

“Memang akhirnya PDIP setuju untuk menghapus ketentuan soal Trisila dan Ekasila, dan memasukkan TAP MPRS no XXV/1966 ke dalam



RUU HI”, urainya.

Tetapi, lanjutnya, kesadaran publik akan masalah-masalah mendasar yang timbul akibat RUU HIP sudah sangat meluas, termasuk pihak-pihak yang menuntut agar RUU HIP ini dihentikan atau ditolak bahkan dicabut dari Prolegnas. Juga semakin beragam, bukan hanya dari Kelompok Agama Islam saja, bahkan dari Legiun Veteran dan Pemuda Pancasila serta Forum Guru Besar UPI.

“Saat pandemi Covid-19, demo menolak RUU HIP itu semakin meluas di pusat maupun di daerah. Banyak sekali pihak, baik pimpinan MPR, pimpinan DPD dan sebagian fraksi di DPR, Menkopolhukam, maupun

ormas lintas agama (NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, Hikmahbudhi, PHDI, Matakin) MUI, FPI, PP (Pemuda Pancasila) Legiun Veteran RI, Asosiasi Dosen se-Indonesia, Aliansi Perempuan Peduli Indonesia, GP Anshor, ICMI dan lainnya, sepakat agar RUU HIP ini dihentikan pembahasannya. Dalam rapat kerja di Baleg bersama Pemerintah dan DPD, anggota baleg dari FPKS juga sudah sampaikan lagi agar sebagai pihak yg usulkan (sekalipun tidak bulat) agar Baleg/DPR menarik usulannya ke Pemerintah dan menyepakati bersama Pemerintah dan DPD untuk menarik RUU HIP.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

**Banyaknya Penolakan Masyarakat**

# Habib Aboe Ajak Pemerintah untuk Tolak RUU HIP

Yang disuarakan masyarakat adalah penolakan RUU HIP, jadi yang mereka minta bukan sekedar penundaan pembahasan. Tentu ini harus didengarkan dengan baik, apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Jika masyarakat menolak, kenapa masih ada pemaksaan untuk pembahasan. Oleh karenanya sebaiknya RUU ini di drop dari prolegnas

## HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

Jakarta (08/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aboebakar Al-Habsy, mengajak Pemerintah dan DPR untuk duduk bersama dalam menyepakati pembatalan RUU HIP, mengingat kecangganya penolakan dari seluruh elemen masyarakat akhir-akhir ini.

"Saya kira ini sangat mendesak, karena publik sensitif dengan isu tersebut," ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Habib Aboe ini mengatakan Pemerintah melalui Menko Polhukam sudah menyampaikan akan

melakukan penundaan pembahasan RUU HIP.

"Namun seperti saya statemen ini saja tidak cukup. Terbukti aksi demonstrasi oleh masyarakat masih digelar di mana mana. Mereka melakukan penolakan terhadap RUU tersebut," tutur Anggota Komisi III DPR RI ini.

Habib Aboe menambahkan yang disuarakan masyarakat adalah penolakan RUU HIP, jadi yang mereka minta bukan sekedar penundaan pembahasan.

"Tentu ini harus didengarkan dengan baik, apa

yang menjadi aspirasi masyarakat," ungkapnya

Jika ada pihak yang masih ngotot melakukan pembahasan, imbuhnya, tentunya ini akan menimbulkan pertanyaan, untuk siapa sebenarnya RUU tersebut.

"Jika masyarakat menolak, kenapa masih ada pemaksaan untuk pembahasan. Oleh karenanya sebaiknya RUU ini di drop dari prolegnas", tutup Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan ini.



Banyaknya Penolakan Masyarakat

# Pemerintah Harus Tolak RUU HIP



Yang disuarakan masyarakat adalah penolakan RUU HIP, jadi yang mereka minta bukan sekedar penundaan pembahasan. Tentu ini harus didengarkan dengan baik, apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Jika masyarakat menolak, kenapa masih ada pemaksaan untuk pembahasan. Oleh karenanya sebaiknya RUU ini di drop dari prolegnas

**Habib Aboe Bakar Alhabsyi,**  
Anggota Komisi III DPR RI

## Dukung Tes Swab Massal Prajurit TNI

# Komisi I DPR: Asal Alat Mencukupi

Bagus, saya setuju banget. Bahkan mestinya sudah dari kemarin-kemarin nggak usah nunggu kejadian di Secapa AD. Karena tentara kita harus sehat semua agar dapat bertugas dengan baik

### **Dr. ABDUL KHARIS A, SE. M.Si.Akt**

Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Jakarta (13/07) — Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meminta semua prajurit TNI dites swab virus Corona (COVID-19). Komisi I DPR menganggap hal itu ide bagus jika alat tes mencukupi.

“Menurut saya bagus-bagus saja kalau memang alat kita cukup untuk semua ya, prajurit TNI kan banyak sekali, kalau memang kita punya alat tes yang cukup saya rasa itu ide bagus,” kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid kepada wartawan, Jumat (10/7/2020).

Meski begitu, Meutya mengatakan perlu juga adanya langkah pencegahan seperti penerapan physical distancing saat latihan serta kamar tidur asrama yang tidak berkerumun. Dia menilai proses selama pendidikan juga perlu diperhatikan karena rentan terjadi penularan.

“Tapi kan tetap ya, yang paling utama adalah preventif, kalau dites berkali-kali, tapi tidak ada perubahan atau tidak ada modifikasi dari cara-cara latihan, pengajaran, penginapan, baik di barak ataupun asrama, maka ya tetap rentan,” ujarnya.

Sama halnya dengan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almayshari. Dia mendukung adanya tes swab secara masal agar semua prajurit dapat bertugas dengan baik.

“Bagus, saya setuju banget. Bahkan mestinya sudah dari kemarin-kemarin nggak usah nunggu kejadian di Secapa AD. Karena tentara kita harus sehat semua agar dapat bertugas dengan baik,” kata Kharis.

Sebelumnya, permintaan pemeriksaan swab buat seluruh prajurit TNI ini tidak terlepas

dari kemunculan klaster Corona di Sekolah Calon Perwira (Secapa) TNI AD Bandung, Jawa Barat. Prabowo meminta seluruh prajurit TNI dites swab corona, agar siap sedia saat diperintahkan menjalankan suatu tugas. Prabowo ingin pemeriksaan swab kepada seluruh prajurit TNI dilakukan secara berkesinambungan.

“Terkait dengan hal tersebut, Pak Prabowo meminta ada tes swab massal memang kepada seluruh prajurit TNI, agar semuanya selalu siap sedia menjalankan tugas. Apalagi saat ini TNI menjadi salah satu ujung tombak penanganan COVID-19 di lapangan,” kata juru bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjutak, kepada wartawan, Jumat (10/7/2020).

“Beberapa kali (tes swab) sudah dilakukan di beberapa unit dan kesatuan. Beliau minta bisa dilakukan secara berkesinambungan dan lebih luas, karena prajurit TNI banyak turun, terlibat langsung dalam penanganan COVID-19, termasuk yang di Wisma Atlet dan di banyak tempat lainnya,” lanjut Dahnil.



## WNI Terinfeksi Covid-19 Bertambah

# Toriq: Pelayanan Informasi Kemlu harus Optimal

“Kemlu RI harus segera mengevaluasi terkait cara mensosialisasikan aplikasi Portal Peduli WNI dan Aplikasi Save Travel selama ini kepada masyarakat. Kemudian dari hasil evaluasi tersebut Kemlu RI segera membuat cara mensosialisasikan yang efektif dan masif kepada masyarakat

### **KH. TORIQ HIDAYAT, Lc**

Anggota Komisi I DPR RI

Tasikmalaya (08/07) — Anggota Komisi I DPR-RI asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Toriq Hidayat, menyampaikan rasa prihatin terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang terinfeksi Covid-19 diseluruh dunia.

Dalam Rapat Panja, Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa hingga hari ini (7/7/20) jumlah WNI di luar negeri yang terinfeksi Covid-19 bertambah menjadi 1.136 orang.

“Kami, PKS, menyampaikan rasa prihatin dan turut berduka cita kepada WNI diluar negeri yang meninggal dunia

akibat terinfeksi virus Covid-19. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah SWT. Hingga saat ini WNI yang meninggal dunia bertambah menjadi 77 orang, 311 orang dalam perawatan dan 748 orang dinyatakan sembuh. Semoga WNI yang dalam perawatan diberikan kesembuhan oleh Allah SWT,” ungkap Toriq.

Kemlu RI dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri telah melakukan Refocusing Diplomasi RI pada penanganan Covid-19. Yakni pertama pembentukan Gugus Tugas

Penanganan Covid-19. Kedua realokasi anggaran. Ketiga penguatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri. Keempat membuka akses kerjasama internasional untuk penanganan di dalam negeri. Dan yang kelima penguatan teknologi dan informasi.

“Hingga saat ini Kemlu RI telah memfasilitasi 123.319 orang WNI untuk pulang ke Indonesia. Jumlah ini termasuk diantaranya evakuasi WNI di Wuhan dan para ABK kapal Pesiar Diamond Princess. Kemlu RI juga telah menyalurkan 522.859 paket bantuan kepada WNI di seluruh dunia yang ekonominya terdampak Pandemi Covid-19”, ungkap Toriq berikan apresiasi atas kinerja Kemlu RI.

Dalam upaya penanganan Covid-19, Kemlu RI telah melakukan penguatan pelayanan informasi teknologi. Yakni melalui portal peduli WNI, aplikasi Save Travel dan sms blast Kemlu Ri berupaya memberikan informasi dan pelayanan bagi WNI diluar negeri terdampak Covid-19. Dengan Portal Peduli WNI, masyarakat Indonesia dapat melakukan lapor diri dan



mengajukan permohonan dokumen penting, bahkan WNI bisa melaporkan kondisi darurat yang dialaminya kepada perwakilan RI tanpa harus datang ke kantor perwakilan.

“Dengan Aplikasi Save Travel, WNI dapat mengakses informasi dan notifikasi seputar negara tujuan terkait seperti: hukum atau kebiasaan setempat, perbedaan waktu, kondisi keamanan, pelayanan perwakilan RI dan bahkan serangkaian informasi, himbauan, saran dan peringatan kondisi pandemi Covid-19 di negara tersebut. Sedangkan SMS blast adalah layanan sms berisi informasi kontak dan lokasi perwakilan RI terdekat yang dikirim saat WNI sampai di negara tujuan” jelas Toriq.

“Namun upaya pelayanan dan perlindungan WNI oleh Kemlu RI melalui pelayanan informasi teknologi menjadi tidak optimal ketika jumlah WNI yang menggunakan layanan ini hanya sedikit. Sebagai contoh Aplikasi save travel baru didownload oleh sekitar 50 ribu orang. Jumlah tersebut sangat kecil dibanding jumlah WNI yang berada di luar negeri yaitu sekitar 2 juta orang, sebagaimana yang disampaikan Kemlu RI.

“Kemlu RI harus segera mengevaluasi terkait cara mensosialisasikan aplikasi Portal Peduli WNI dan Aplikasi Save Travel selama ini kepada masyarakat.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Surahman Hidayat: Mendagri Harus Bantu Daerah Siapkan Anggaran Pilkada

Sangat mungkin ada daerah yang menggunakan dana alokasikan pelaksanaan pilkada untuk penanganan covid-19. Jadi tugas Mendagri tidak hanya memastikan kepala daerah segera mencairkan dana pilkada agar KPU dan Bawaslu bisa mempersiapkan persiapan pilkada dengan baik, tetapi juga mencari solusi termasuk mengkomunikasikan penggunaan APBN untuk membantu daerah-daerah yang kekurangan anggaran pelaksanaan pilkada

## Dr. KH SURAHMAN HIDAYAT, M.A.

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (06/07) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Surahman Hidayat, meminta Mendagri tidak hanya memberikan deadline kepada kepala daerah untuk mencairkan dana pilkada yang telah disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), namun memberikan solusi apabila ada daerah

yang kekurangan dana pilkada. "Sangat mungkin ada daerah yang menggunakan dana alokasikan pelaksanaan pilkada untuk penanganan covid-19. Jadi tugas Mendagri tidak hanya memastikan kepala daerah segera mencairkan dana pilkada agar KPU dan Bawaslu bisa mempersiapkan persiapan pilkada dengan baik,

tetapi juga mencari solusi termasuk mengkomunikasikan penggunaan APBN untuk membantu daerah-daerah yang kekurangan anggaran pelaksanaan pilkada. Apalagi anggaran pelaksanaan pilkada 2020 menjadi lebih besar, karena pelaksanaannya harus mengikuti protokol kesehatan," tutur Surahman.

Surahman Hidayat mengingatkan persiapan pilkada sudah semakin sempit, pelaksanaan pilkada akan dilaksanakan bulan desember 2020, maka persiapan perangkat pelaksana dan perlengkapan pelaksanaan harus sudah mulai dipersiapkan.

"Anggaran pendukung sudah sangat diperlukan KPU dan Bawaslu dalam persiapan tahapan pilkada. Terlambatnya pencairan anggaran akan dapat menyebabkan kekacauan pelaksanaan pilkada, yang ujungnya berpotensi terjadinya konflik sosial. Ditengah situasi sulit saat ini, masyarakat sangat rentan tersulut emosi," kata



Surahman.

Lebih lanjut Surahman menyampaikan bahwa Mendagri seharusnya sudah mempunyai peta mana daerah yang berpotensi kekurangan anggaran pelaksanaan pilkada.

"Mendagri perlu berkomunikasi secara intens dengan kepala daerah yang melaksanakan pilkada tahun ini, untuk mengetahui kondisi keuangan masing-masing daerah, mendagri harus aktif, tidak menunggu laporan daerah," tegas Surahman.

Menurut anggota dewan

daerah pemilihan Jawa Barat X ini, pandemi covid-19 membuat perekonomian daerah sangat menurun, provinsi tidak bisa menanggung apabila ada kabupaten/kota diwilayahnya yang meminta bantuan anggaran pilkada, karena APBD provinsi pun sangat terdampak.

"Mendagri harus bisa membantu kepala daerah mempersiapkan anggaran pilkada buka hanya memberikan deadline bagi kepala daerah," pungkas Surahman.

**Habib Aboe Bakar Alhabsyi**

# Kemauan dan Integritas Penegak Hukum Jadi Kunci Penangkapan Maria Pauline

Kunci keberhasilan penegakan hukum pada kemauan dan integritas para pelaksananya. Sedangkan cara dan tehniknya bisa dicari.

## HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

Jakarta (10/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aboebakar Al-Habsy, menanggapi ekstradisi terhadap Maria Pauline Lumowa, buronan pelaku pembobol Bank BNI Rp 1,7 triliun dari Serbia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"Saya ucapkan selamat kepada Menkumham, ini hasil kerja beliau. Apa yang dilakukan pasti dengan diplomasi tingkat tinggi", ungkap pria yang akrab disapa Habib Aboe ini.

Habib Aboe menambahkan, apa yang didapatkan Menkumham, merupakan keberkahan

an atas kunjungan Duta Besar Serbia untuk Indonesia Slobodan Marinkovic ke Menkumham beberapa waktu lalu.

"Kunjungan balasan Menkumham ke Serbia mendapat atensi yang baik dari Presiden Serbia. Hasilnya bisa memulangkan buron tersebut," tandas Anggota Komisi III DPR RI ini.

Meski, lanjut Habib Aboe, aparat baru bisa menangkapnya setelah melarikan diri selama 17 tahun, hal tersebut dikarenakan Indonesia belum punya perjanjian hukum timbal balik atau MLA dengan Serbia.

"Saat ini kita masih pada

proses peninjakan untuk pembuatan MLA tersebut. Mungkin ini salah satu kendala untuk memulangkan buron", ungkapnya.

Habib Aboe menambahkan pihaknya juga memberikan evaluasi kepada Kemenkumham terkait belum ditangkapnya Djoko Tjandra, salah seorang terpidana, yang bisa bebas masuk Indonesia.

"Saya lihat itu koreksi buat Menkumham juga. Djoko Tjandra dikabarkan sudah meninggalkan Indonesia usai membuat KTP elektronik dan pendaftaran Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan", terang Habib Aboe.

Kuasa Hukum Djoko Tjandra gantungkap, imbuhnya, saat ini buronan Kejaksaan Agung itu sudah berada di Malaysia. Sedangkan Dirjen Imigrasi tidak merekam perlintasan masuk dan keluarnya Djoko Tjandra, ini merupakan sesuatu yang aneh.



"Ada apa sebenarnya dengan imigrasi kita. Jangan sampai negara bisa dibuat mainan sama orang asing yang tak bertanggung jawab," tegas Benda-hara Fraksi PKS DPR RI ini.

Terkait dengan kinerja para penegak hukum, kata Aboe, seharusnya mereka bekerja keras agar pelaku kejahatan tak mudah lagi kabur keluar negeri.

"Kalau soal perlintasan, kuncinya ada di Dirjen Imigrasi. Saya rasa Menkumham perlu mengevaluasi sistem perlintasan kita. Jika sistemnya tak bermasalah, maka yang bermasalah sebenarnya pelaksana di

lapangan," urainya.

Di akhir pernyataannya, Habib Aboe memberikan catatan penting terkait dengan proses ekstradisi Maria Pauline Lumowa yakni pada kemauan dan integritas penegak hukum.

"Kunci keberhasilan penegakan hukum pada kemauan dan integritas para pelaksananya. Sedangkan cara dan tehniknya bisa dicari. Meskipun kita belum ada MLA dengan Serbia, yang secara teori mustahil melakukan pemulangan, faktanya hal itu bisa dilakukan," tutup Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan ini.

# NAIK

## TERHITUNG 1 JULI 2020

10%



### PAJAK DIGITAL BERLAKU

Pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE)

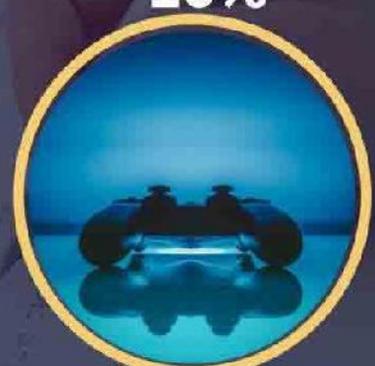
85 - 96%



### BPJS NAIK

- kelas I jadi Rp 150.000 atau naik 85,78%
- kelas II jadi Rp 100.000 atau naik 96,07%
- kelas III Rp 25.500 sepanjang tahun 2020. Sedangkan di tahun berikutnya akan membayar Rp 35.000 per orang per bulan.

10%



### PAJAK GAME BERLAKU

10 % PPN untuk pembelian aplikasi dan game online yang berasal dari luar negeri.



Peringati HUT SPI Ke-22

# Anggota Fraksi PKS Perjuangkan Kesejahteraan Petani

Jakarta (09/07) — Dalam momentum HUT Serikat Petani Indonesia (SPI) yang ke-22, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Slamet berharap, nasib petani dalam negeri dapat lebih mendapat jaminan kesejahteraan.

Jakarta (09/07) — Dalam momentum HUT Serikat Petani Indonesia (SPI) yang ke-22, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Slamet berharap, nasib petani dalam negeri dapat lebih mendapat jaminan kesejahteraan.

“Sudah saatnya Pemerintah terus berupaya dan menjadikan profesi petani menjadi profesi yg membanggakan, bukan

sebaliknya, profesi yg termarginalkan,” ujar Slamet. Ini momentum yang baik, sambung Slamet, terutama pemerintah, untuk dapat memikirkan bagaimana nasib para petani.

Slamet menuturkan, kesejahteraan petani merupakan poin inti dari

“Sudah saatnya Pemerintah terus berupaya dan menjadikan profesi petani menjadi profesi yang membanggakan, bukan sebaliknya, profesi yang termarginalkan

**MEMPERINGATI  
HARI SERIKAT PETANI  
INDONESIA KE 22**

**drh. H. SLAMET**

Anggota Komisi IV DPR RI



# Legislator PKS: Stimulus Anggaran Covid-19 Tidak Berdampak Bagi Petani

Fraksi kami dan tentunya seluruh anggota di komisi IV, akan selalu mendorong Pemerintah untuk bekerja lebih cepat dan tepat dalam jangka pendek maupun jangka menengah yang berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Realisasi stimulus ekonomi seperti BLT harus lebih cepat terlaksana. Kita tidak boleh menunggu petani semakin terpuruk pada kondisi seperti ini

**Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (07/07) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin menilai, Pemerintah belum cukup turun tangan pada penyelamatan kehidupan petani di masa pandemi covid-19 yang hingga saat ini masih berlangsung.

Dua Bulan berturut-turut, kata Akmal, Mei - Juni 2020 petani mengalami defisit yang di tunjukkan dari NTP (Nilai Tukar Petani) masih dibawah 100. Berdasarkan data BPS

yang telah di rilis 1 Juli 2020 lalu, Nilai Tukar Petani (NTP) Juni 2020 yang mencapai angka mengindikasikan tertekannya daya beli dan kesejahteraan petani selama masa pandemi Covid-19.

"Program Pemerintah terhadap petani masih belum berdampak terhadap kehidupan petani. Petani mengalami defisit. Penerimaan tidak sebanding dengan pengeluaran pada usaha taninya. Ini perlu menjadi

perhatian bersama, sehingga ada evaluasi, dimana efektifitas anggaran covid-19 yang besar itu", tukas Akmal.

Akmal menjelaskan, bahwa refocusing anggaran Kementerian Pertanian 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar 2,65 Triliun.

Alokasi untuk ketersediaan pangan (1,46 Triliun) dan Social Safety Net (1,15 Triliun). Angka-angka ini seharusnya sudah mampu memberi kontribusi terhadap perbaikan petani apabila pelaksanaannya sesuai prosedur dan ada uangnya bukan sekedar anggaran di atas kertas.

Pemerintah menurut Akmal, harus mampu menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi sehingga akan banyak yang membantu memberi gagasan baik di DPR maupun di intern pemerintahan untuk menemukan solusi permasalahan yang selama ini terjadi.

Selama ini, imbuhnya, hampir tidak ada update realisasi misalnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Petani yang



terdampak Covid-19 yang sudah di alokasikan.

"Fraksi kami dan tentunya seluruh anggota di komisi IV, akan selalu mendorong Pemerintah untuk bekerja lebih cepat dan tepat dalam jangka pendek maupun jangka menengah yang berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Realisasi stimulus ekonomi seperti BLT harus lebih cepat terlaksana. Kita tidak boleh menunggu petani semakin terpuruk pada kondisi seperti ini", ucap Akmal.

Politisi PKS ini meminta dengan sangat pada pemerintah agar ada sistem logistik pangan yang semakin

terintegrasi. Penyederhanaan dan distribusi produk pertanian yang mudah dan cepat sangat penting sekali pada kondisi wabah seperti ini. Prediksi dari beberapa ahli, pandemi Covid-19 akan berdampak sampai tahun 2021.

"Kami sangat mendukung Menteri Pertanian yang sudah mengusulkan penambahan anggaran 2021 sebesar 10 Triliun. Presiden Jokowi seharusnya menyetujui penambahan anggaran Kementan tahun 2021 sehingga tercapai target peningkatan produksi dan kesejahteraan petani", tutup Andi Akmal Pasluddin.

## Kontroversi Kalung 'AntiVirus',

# Aleg PKS: Terlalu Terburu-Buru dan Tidak Ilmiah

Upaya Kementan ini terlalu terburu-buru dalam merilis produk kalung aroma terapi yang masih tergolong jamu, bukan obat. Menjadi persoalan sudah ada klaim dapat menyembuhkan Covid-19. Tanpa penjelasan memadai, banyak pihak akan menyangka kelenik atau jimat

### Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (06/07) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin sangat menyangkan upaya pemerintah yang sudah bekerja keras untuk mengendalikan virus corona dengan menemukan berbagai produk baik itu obat maupun jamu, tetapi tidak dilakukan penjelasan dan komunikasi publik yang baik sehingga menimbulkan keributan.

"Saya sebenarnya mengapresiasi berbagai lembaga yang telah berupaya melakukan pencarian dan penemuan produk obat maupun metode untuk mengendalikan virus corona ini.

Tapi semua uji ilmiah beserta penjelasannya harus dilakukan secara seksama sehingga tidak perlu menimbulkan kontroversial", ucap Hamid.

Legislator Komisi IV asal Jawa Tengah IV ini menerima penjelasan pihak pemerintah, bahwa upaya kementerian pertanian menemukan produk dalam negeri yang efektif, efisien, murah untuk melawan virus corona.

Penjelasan yang ia terima, bahwa Mynak atsiri Eucalyptus diantaranya yang mengandung 1,8 cineole sudah diuji terhadap virus corona (beta dan gamma

corona) di lab biosecurity level 3 Kementan. Hasilnya mampu membunuh virus corona 80 - 100 %.

Tetapi Politisi PKS ini menyarankan, sebaiknya pemerintah terutama pihak Kementerian Pertanian, mesti mampu melakukan uji ilmiah maupun uji publik yang paten sehingga mendapat kepercayaan serta penerimaan di masyarakat.

Karena bila penemuan kalung aroma terapi produk dari Kementan ini bila dikatakan obat, maka harus melalui tahap uji klinis kepada manusia sesuai dengan prosedur penelitian obat.

"Upaya Kementan ini terlalu terburu-buru dalam merilis produk kalung aroma terapi yang masih tergolong jamu, bukan obat. Menjadi persoalan sudah ada klaim dapat menyembuhkan Covid-19. Tanpa penjelasan memadai, banyak pihak akan menyangka kelenik atau jimat", ujar Hamid.

Anggota Fraksi PKS ini menyarankan kepada Kementan, segala tindakan penyembuhan penyakit harus ketat dalam



persoalan ilmiah dan uji klinis. "Segala asumsi dan uji coba empiris yang tidak berbasis dilakukan dapat membuat gaduh," urainya.

Sebagai contoh, katanya, yang perlu dihindari adalah, priaku analogi mynak Eucalyptus memiliki 1,8 cineole, lantas dapat di klaim merusak struktur protein (mpro) dari virus corona sehingga virus tidak bisa memperbanyak diri, lalu mati.

"Segala upaya penemuan

yang tidak melalui uji klinis akan berhadapan pada perusahaan farmasi besar sekaligus kode etik kedokteran. Langkah Kementan memang seharusnya di dukung untuk menemukan produk penyembuh berasal dari dalam negeri. Tapi dukungan pemenuhan standard dan prosedur mesti dilalui dahulu baru merilis produk tersebut", tutup Hamid Noor Yasin

# KLHK Harus Temukan Teknologi Klasifikasi Sampah

Problem kita mengklasifikasikan sampah. Kita dorong saja KLHK membuat program untuk bisa mempercepat mengklasifikasikan sampah ini, seperti negara-negara lain. Sehingga kita tidak kesulitan lagi mengatasi ini. Supaya ada cara dan teknologi yang cepat untuk mengklasifikasikan, problem utamanya di sana

## Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar segera menemukan cara dan teknologi untuk mengklasifikasikan sampah. Hal ini penting agar negara bisa terhindar dari sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Pernyataan ini dia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan KLHK.

"Problem kita mengklasifikasikan sampah. Kita dorong

saja KLHK membuat program untuk bisa mempercepat mengklasifikasikan sampah ini, seperti negara-negara lain. Sehingga kita tidak kesulitan lagi mengatasi ini. Supaya ada cara dan teknologi yang cepat untuk mengklasifikasikan, problem utamanya di sana," papar Hermanto di Ruang Rapat Komisi IV Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Berdasarkan sifatnya, jenis

sampah dibagi menjadi tiga yaitu sampah organik, sampah anorganik dan beracun. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos.

Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sebagai sampah komersial atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya.

Kemudian ada juga sampah bahan berbahaya dan beracun (B3). Contoh sampah beracun ialah seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik dan lain-lain. Diterangkan dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang termasuk sampah B3 ialah sampah yang mengandung



bahan berbahaya dan beracun. Ciri sampah B3 yang lain ialah sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan yang timbul secara periodik.

Pengklasifikasian sampah ini dianggap penting untuk mendapatkan sisi benefit. Meskipun demikian Hermanto mempertanyakan soal impor sampah, apakah produksi sampah dalam negeri belum

bisa memenuhi kebutuhan industri nasional.

"Dalam prespektif yang bersifat benefit kita melihat keekonomian sampah ini seperti apa. Memang ada kebutuhan industri, tapi apakah produksi sampah di dalam negeri ini belum bisa memenuhi kebutuhan industri," tanya Politisi dari Fraksi PKS. (eko/es)



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

Bagan-siap

Pulau Rupat

Dumai

Duri

Sontang



ANGGOTA KO

Jika pemerintah tidak segera mengatasi dan menanggulangi abrasi tersebut, maka kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan terancam. Sebab, pulau-pulau tersebut berada di beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka-Malaysia

**H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.**

Anggota Komisi V DPR RI

# Empat Pulau di Riau Terancam Tenggelam Kedaulatan Nasional Terancam

4 pulau terdepan Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis, Riau, terancam tenggelam akibat abrasi yang sudah lama terjadi dan tak kunjung ada penanganannya. Ke empat pulau itu adalah Pulau Mandi, Pulau Ransang, Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat. Dari empat pulau itu, tiga diantaranya kondisinya saat ini sangat memprihatinkan

## Empat Pulau di Riau Terancam Tenggelam

# Aleg PKS: Kedaulatan Nasional Terancam

Jika pemerintah tidak segera mengatasi dan menanggulangi abrasi tersebut, maka kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan terancam. Sebab, pulau-pulau tersebut berada di beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka-Malaysia

## H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.

Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta (10/07) — Kedaulatan dan keamanan nasional saat ini tengah terancam. Pasalnya, empat pulau terdepan Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis, Riau, terancam tenggelam akibat abrasi yang sudah lama terjadi dan tak kunjung ada penanganan.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI, dari fraksi PKS, Syahrul Aidi Maz'at usai rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara Gubernur Riau, Syamsuar dengan Komisi V DPR RI terkait percepatan pembangunan dan pembiayaan

infrastruktur di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (09/07/2020).

"Ke empat pulau itu adalah Pulau Mandi, Pulau Ransang, Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat. Dari empat pulau itu, tiga diantaranya kondisinya saat ini sangat memprihatinkan," ujarnya.

Menurut Syahrul Aidi, sepanjang 167 kilometer bibir pantai terus digrogoti air laut. Besar gerusan tanah longsor akibat abrasi itu kata Dia, mencapai 20-30 meter pertahunnya.

"Jika pemerintah tidak se-

gera mengatasi dan menanggulangi abrasi tersebut, maka kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan terancam. Sebab, pulau-pulau tersebut berada di beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka-Malaysia," urainya.

Persoalan ini kata Syahrul, bukan lagi sebatas urusan daerah. Namun, sudah seharusnya menjadi perhatian nasional. Terlebih lagi sudah menyangkut kedaulatan dan keamanan negara.

"Ketika kita berbicara kedaulatan negara, kita tidak lagi berbicara tentang daerah," tegasnya.

Anggota DPR RI dari Dapil Riau II itu juga menyayangkan perhatian pemerintah yang menurutnya masih setengah hati menanggulangi abrasi dengan melakukan penangkal air laut sekitar 800 meter saja pertahunnya.

"Jadi saya minta pemerintah serius, jangan setengah hati," tambahnya.

Ia juga mendesak pemerintah dalam hal ini



Kementerian PUPR segera mengambil langkah kongkrit dalam mengatasi persoalan abrasi di Pulau-pulau tersebut, agar kelangsungan hidup penghuni Pulau itu tetap ada.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Riau, Syamsuar menjelaskan kondisi terkini ketiga pulau yang dimaksud Syarul Aidi.

Terlebih, kontruksi tanah di pulau itu mayoritas gambut.

Ketika air pasang, kata Syamsuar, bibir tebing di pulau itu langsung tergerus air dan menyebabkan pemukiman penduduk ikut runtuh.

Banyak tanah masyarakat hilang, rumah hilang, tanam-tanaman juga hilang tentunya ini juga akan berpengaruh terhadap atanan sosial masyarakat disana," pungkash Syamsuar.

# Ahmad Syaikh Desak Pemerintah Lakukan Empat Hal Soal Tapera

Jika memang Tapera tidak bisa ditunda, saya mendesak pemerintah melakukan empat hal agar program Tapera menguntungkan rakyat

## H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta (09/07) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Syaikh, mendesak Pemerintah melakukan empat hal penting terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Hal itu Syaikh sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Komisiner Tapera, Kamis (09/07) di Gedung Parlemen, Jakarta.

"Jika memang Tapera tidak bisa ditunda, saya mendesak pemerintah melakukan empat hal agar program Tapera menguntungkan rakyat," ujar Syaikh.

Pertama, dalam Kepmen PUPR No. 242/KPTS/M/2020 diatur batasan maksimal penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pada kelompok sasaran KPR Sejahtera, KPR SSB dan SSM, ada batasan penghasilan per bulan maksimal Rp 8 juta. Syaikh mempertanyakan alasan aturan tersebut.

"Ini dasarnya apa? Rasionalisasinya apa sehingga menetapkan batas maksimal Rp 8 juta untuk ikut Tapera?" tanya Syaikh.

Menurut Syaikh, angka ini tentu saja bisa merugikan bagi mereka yang berhak ikut Tapera, khususnya bagi suami istri yang memiliki penghasilan

gabungan melebihi Rp 8 juta. Misal, ada suami istri bekerja di DKI Jakarta. Dengan UMR sekitar Rp 4,2 jutaan, maka jika digabung jumlahnya Rp 8,4 jutaan. Otomatis tidak dapat ikut Tapera padahal mereka belum punya rumah.

"Jangan sampai aturan ini merugikan," tegas Politisi PKS itu.

Syaikh menyatakan perlu pijakan yang kuat jika memang ingin menetapkan batas maksimal Rp 8 juta. Contohnya Rp 8 juta dijadikan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Ini jadi landasan bagi pemerintah untuk mengikutsertakan MBR dalam Tapera. Sebab pajak penghasilannya saja masih dibebaskan.

Kedua, Syaikh mengingatkan bahwa disamping mengelola dana dari eks Bapetarum, Tapera juga menerima peserta dari FLPP, dana wakaf dan dana program pembiayaan perumahan lainnya. Itu artinya, target 500.000 masih dirasakan kurang. Sebab backlog pada awal 2020 untuk kelompok ini masih sebesar



1,72 juta unit. Belum lagi penambahan kebutuhan perumahan setiap tahunnya.

"Ini tentu saja masih sangat jauh angkanya. Kebutuhannya jelas di atas 500 ribu unit rumah," ungkap Syaikh.

Ketiga, Syaikh meminta Tapera ditunda, mengingat situasi yang masih terdampak pandemi Covid-19. Tapi, jika tidak ditunda Syaikh minta pemerintah bisa memberikan subsidi khususnya kepada ASN Golongan I dan II.

Idealnya ditunda. Tapi jika pemerintah memaksa, maka saya ingin ada subsidi bagi ASN Golongan I dan II.

Sebab potongan sebesar Rp 2,5% itu memberatkan di tengah situasi sekarang," kata Syaikh.

Keempat, Syaikh berharap BP TAPERA bisa membantu aksesibilitas peserta untuk mendapatkan perumahan. Disamping itu, setelah selesai melakukan cicilan, BP TAPERA bisa membantu peserta untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas rumahnya.

"Ini sangat penting. Para peserta harus dapat kejelasan status kepemilikan rumah setelah selesai," pungkas Syaikh.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

# Biofarma Perlu Bangun Keamanan Bidang Kesehatan dan Ekonomi

“Dengan berbagai kekuatan yang dimiliki biofarma, semua pihak pasti mendukung bahwa PT Biofarma segera menemukan vaksin covid-19. SDM dan infrastruktur serta pengalaman yang selama ini dimiliki mesti menjadi modal besar pada penemuan vaksin ini yang teruji secara medis

**Hj. Nevi Zuairina**  
Anggota Komisi VI DPR RI

Foto dpr.go.id  
image - Istimewa

# Nevi: Biofarma Perlu Bangun Keamanan Bidang Kesehatan dan Ekonomi

Dengan berbagai kekuatan yang dimiliki biofarma, semua pihak pasti mendukung bahwa PT Biofarma segera menemukan vaksin covid-19. SDM dan infrastruktur serta pengalaman yang selama ini dimiliki mesti menjadi modal besar pada penemuan vaksin ini yang teruji secara medis

## Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Bandung (10/07) — Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke ke PT. Bio Farma (Persero) Bandung dalam rangka melihat langsung kesiapan dan peran holding BUMN Farmasi, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, meminta kepada perusahaan plat merah ini untuk membangun keamanan bidang kesehatan (Healthy Security) dan keuntungan ekonomi.

Kunjungan spesifik ini untuk mengetahui kejadian lapang pada usaha mengatasi Pandemi Corona Virus (Covid-

19) di Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan negara.

"Healthy Security ini dapat beriringan dengan membangun keekonomian yang menguntungkan buat negara. Tapi perlu serius dan berkejaran dengan waktu. Ketika tepat pelaksanaan dan mampu berinovasi cepat dibanding negara lain, maka dapat membalikkan keterpurukan negara dari dampak ekonomi buruk akibat wabah", ucap Nevi pada Kamis, (9/7/2020).

Politisi PKS ini sangat menyarankan kepada PT Biofarma agar menemukan bahan baku

dari dalam negeri sehingga menekan angka impor bahan baku produk-produk farmasi.

"Riset dan Inovasi yang bekerjasama dengan berbagai kampus dan lembaga riset perlu terus dilakukan untuk memperkaya aset ilmu dan produk terapan bidang kesehatan", ungkapnya.

Nevi melanjutkan, bahwa Indofarma mendapat dampak positif dari adanya Perppu Nomor 1 tahun 2020 Perppu 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Peningkatan Pandemi COVID-19.

Pasalnya, Indofarma masih memasok sebagian besar bahan baku dari luar negeri. Bukan hanya produk kimia dasar yang perlu diimpor perusahaan farmasi. Tetapi juga Produk seperti natural extract (Natex) dan alat kesehatan.

Berdasarkan keterangan yang ia terima, bahwa Pada 31 Januari 2020 Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) farmasi resmi terbentuk, dengan PT Bio Farma menjadi



induk perusahaannya. Adapun holding BUMN farmasi terdiri dari PT Kimia Farma Tbk (KAEF), PT Indofarma Tbk (INAF), serta menargetkan pendapatan senilai Rp16,8 triliun pada 2020. Total aset yang kini dimiliki oleh ketiga perusahaan tersebut berkisar Rp30,6 triliun

Pada blue print holding BUMN farmasi, lanjutnya, Bio Farma yang ditunjuk menjadi induk usaha, kebagian memproduksi vaksin dan antisera, atau serum darah yang mengandung anti bodi, PT Kimia Farma Tbk menangani produksi farmasi dan bahan baku. Lalu, PT Indofarma Tbk bertransformasi menjadi perusahaan dalam bidang alat kesehatan & produk herba.

"Dengan berbagai kekuat-

an yang dimiliki biofarma, semua pihak pasti mendukung bahwa PT Biofarma segera menemukan vaksin covid-19. SDM dan infrastruktur serta pengalaman yang selama ini dimiliki mesti menjadi modal besar pada penemuan vaksin ini yang teruji secara medis", ucap Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menjelaskan, berdasarkan catatan Federasi Industri Kimia Indonesia (FIKI), selama Februari-April 2020 terjadi peningkatan bahan kimia yang tercatat sekitar 10%-15% dibanding kondisi normal. Namun demikian, kenaikannya bisa lebih besar lagi apabila virus corona terus mewabah dan menjadi semakin tidak terkendali.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

*You Stay At Home,  
We Stay At Parliament*



# Bukhori Salurkan Bantuan Tunai Kepada Guru Ngaji di Jawa Tengah

“Salah satu segmen masyarakat yang kerap luput dari perhatian adalah guru ngaji. Meskipun profesi mereka informal, sejatinya pekerjaan mereka menyangkut urusan dunia-akhirat. Kebijakan peliburan sekolah maupun pembatasan aktivitas belajar tatap muka, secara ekonomi membuat kondisi hidup para guru ngaji ini menjadi sangat sulit”

## **KH. BUKHORI, Lc., M.A.**

Anggota Komisi VIII DPR RI

Semarang (09/07) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf memberikan bantuan tunai kepada 350 guru ngaji yang tersebar di dapil Jawa Tengah I (Kota Semarang, Salatiga, Kabupaten Kendal, dan Semarang).

Bantuan senilai Rp 500 ribu tersebut secara rinci diberikan kepada masing-masing 100 guru ngaji di Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, dan Kota Semarang.

Sedangkan untuk Kota Salatiga sebanyak 50 guru ngaji yang telah menerima manfaat.

“Salah satu segmen masyarakat yang kerap luput dari perhatian adalah guru ngaji. Meskipun profesi mereka informal, sejatinya pekerjaan mereka menyangkut urusan dunia-akhirat. Kebijakan peliburan sekolah maupun pembatasan aktivitas belajar tatap muka, secara ekonomi membuat kondisi hidup para

guru ngaji ini menjadi sangat sulit” ungkap Bukhori saat acara serah terima bantuan bertempat di MD Building, Jawa Tengah, Rabu (08/07/2020).

Bukhori menuturkan, pemberian bantuan tersebut berhasil terselenggara atas kerjasama BPKH dan BAZNAS. Dalam hal penyaluran langsung di masyarakat, Bukhori turut menggandeng sejumlah yayasan atau lembaga seperti Yayasan Rabbani di Kabupaten Kendal, IKADI Semarang untuk Kota Semarang, Yayasan Nurul Amal untuk Kabupaten Semarang, dan IKADI Salatiga untuk penyaluran di Kota Salatiga.

“Penghasilan guru ngaji berkurang signifikan karena PSBB dan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). Namun, Alhamdulillah kita bisa menyerahkan sejumlah bantuan ini secara langsung kepada mereka untuk sedikit meringankan beban mereka. Sejujurnya, bantuan ini tidak sepadan jika dibandingkan dengan kontribusi yang telah diberikan para guru-guru kita



terhadap anak-anak Indonesia dalam rangka menciptakan manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sebagaimana hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan dalam undang-undang. Semoga kita bisa memberikan bantuan selanjutnya dalam kesempatan lain” jelas Bukhori

Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR RI ini telah meminta Pemerintah melalui Menteri Agama untuk serius memperhatikan nasib para guru ngaji yang terdampak secara ekonomi akibat Covid-19 dalam rapat kerja pada 26 Juni silam.

Dalam rapat kerja tersebut

Komisi VIII DPR menyetujui anggaran pagu indikatif Kemenag yang naik menjadi Rp 66,67 T triliun untuk tahun anggaran 2021. Sebelumnya, total pagu anggaran dari Kemenag TA 2020 sebesar Rp 63,89 T triliun

Dalam kesempatan tersebut, Bukhori menekankan kepada Menteri Agama agar dengan anggaran sebesar itu, Kemenag memberikan perhatian serius bagi pendidikan Islam, khususnya bagi pembangunan madrasah swasta yang layak dan kesejahteraan guru ngaji di daerah-daerah terpencil.

## Agar Pemerintah Konsekuen Laksanakan UU Pesantren

# HNW: Bantu Atasi Covid-19

“Menteri Agama telah menyepakati sejak 8 April 2020 untuk memprioritaskan anggaran bagi pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya. Hal itu perlu segera direalisasikan sebagai tanggung jawab kepada DPR, konsekusi konstitusional dari disahkannya UU Pesantren, serta apresiasi negara terhadap sumbangsih dan jasa pesantren bagi Indonesia

### Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

Jakarta (11/07) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, meminta agar Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia, untuk melaksanakan kewajibannya dengan membantu & melindungi Pesantren (baik lembaga maupun Kiyai dan Santri) dari Covid-19.

Pria yang akrab disapa HNW menekankan, Kemenag bisa membantu Pesantren baik dari sisi kelembagaan, kesehatan maupun menanggulangi dampak ekonomi, dengan secara konsekuen menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang

Pesantren.

“UU Pesantren dibuat dan diundangkan tentunya agar bisa bermanfaat untuk membantu Pesantren, baik yang tradisional, modern, mu’adalah maupun yang memadukan antara ilmu Agama dengan Umum. Di era pandemi Covid-19, dimana ada banyak Pesantren yang terdampak, kehadiran UU ini makin relevan, dan karenanya penting secara konsekuen dilaksanakan oleh Pemerintah selaku pelaksana UU,” ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (10/07/2020).

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyebutkan bahwa Pasal

42 UU Pesantren mengamanatkan kepada Pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitas kebajikan, dan pendanaan.

Selain itu, lanjutnya, ada pula Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa pemerintah memberikan dukungan dan fasilitas ke pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat, dengan dukungan berupa: (a) bantuan keuangan; (b) bantuan sarana dan prasarana; (c) bantuan teknologi; dan/atau (d) pelatihan keterampilan.

“Dukungan-dukungan itu tentu perlu disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang saat ini juga berdampak bagi Pesantren”, tuturnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini menuturkan, pihaknya sudah berulang kali menyampaikan agar Kementerian Agama memberikan perhatian yang serius kepada Pesantren saat pandemi Covid-19 ini.

Sejak Rapat Kerja pertama di masa Covid-19 dengan Kementerian Agama (8/4/2020), dirinya sudah mengusulkan agar Kemenag juga memprioritaskan anggaran untuk mendu-



kung pelaksanaan belajar jarak jauh khususnya di Pondok Pesantren dan madrasah.

Bahkan pihaknya menawarkan opsi penggunaan dana abadi pendidikan untuk tujuan itu, dan usulan tersebut telah disetujui oleh Menteri Agama.

“Menteri Agama telah menyepakati sejak 8 April 2020 untuk memprioritaskan anggaran bagi pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya. Hal itu perlu segera direalisasikan sebagai tanggung jawab kepada DPR, konsekusi konstitusional dari disahkannya UU Pesantren, serta apresiasi negara terhadap sumbangsih dan jasa pesantren bagi Indonesia,” ujarnya.

Hidayat menuturkan, pada raker terakhir Komisi VIII dengan Kemenag (26/06/2020), muncul usulan tambahan anggaran 2020 sebesar Rp 2,8 Triliun untuk fasilitasi kegiatan pesantren dan pendidikan keagamaan yg terdampak Covid-19.

Namun, Kementerian Keuangan hanya menyetujui sebesar Rp 2,36 Triliun. Dirinya berharap Kementerian Keuangan segera mencairkan dana tersebut dan Kementerian Agama segera mendistribusikannya kepada Pesantren di seluruh Indonesia secara adil dan amanah.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Dimasa Pandemi

# BPJS NAIK LAGI



PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN.

**Naik  
100%**

PERPRES NO.82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN TERKAIT KENAIKAN IURAN BPJS.

**DIBATALKAN**

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (MA) NO. 7P/HUM/2020 YANG MEMBATALKAN PASAL 34 PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NO.75 TAHUN 2019

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN.

**Naik  
85-96%**



**BPJS Kesehatan dalam setahun NAIK DUA KALI, dibatalkan SEKALI.**

**Meski dibatalkan Mahkamah Agung, tapi Pemerintah tetap Naikan**

## Edaran Tarif Rapid Test Kemenkes

# Netty: Gratiskan untuk Masyarakat Tidak Mampu

Perlu ditertibkan agar tidak merugikan masyarakat. Kita tidak tahu bagaimana standar akurasi, dari mana sumbernya. Lebih baik masyarakat melakukan tes di fasilitas kesehatan resmi yang melayani permintaan rapid test

### Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (11/07) — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mengeluarkan surat edaran tentang penetapan batas maksimal tarif pemeriksaan rapid test, berlaku mulai 6 Juli 2020.

Besaran tarif maksimal 150.000 ini diberlakukan untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan rapid test atas permintaan sendiri.

Merespon kebijakan ini, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetyani,

dalam keterangan media, Sabtu (11/07) mengatakan, seharusnya pemerintah menggratiskan rapid test untuk masyarakat tidak mampu.

"Harus ada formulasi aturan agar masyarakat berpenghasilan rendah, rentan miskin dan tidak mampu dapat menjalani rapid test dengan biaya ditanggung pemerintah. Apalagi dengan konsep new normal yang terus digalakkan, kebutuhan masyarakat akan surat keterangan bebas Covid-19 sebagai syarat bepergian

dengan transportasi umum tentu makin tinggi. Kasihan jika rakyat tidak bisa mobilitas karena biayanya mahal. Begitu juga para karyawan yang mau kembali bekerja dan perusahaan menyaratkan ada surat keterangan bebas Covid-19, sementara tidak membiayai test-nya," ujarnya.

Diketahui kebijakan ini diwarnai kritik dari kalangan pengelola fasilitas Kesehatan, praktisi kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia karena dianggap tidak memperhatikan harga alat tes di tingkat distributor dan komponen biaya lainnya yang timbul.

"Seharusnya dikomunikasikan dulu dengan semua pihak terkait, agar tidak menimbulkan gejolak dan kritik. Saat ini banyak rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang cash flow-nya kurang baik. Jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan, baik masyarakat maupun tenaga medis yang memberikan pelayanan," ujarnya.

Netty sependapat dengan masukan dari IDI yang meminta pemerintah mempertimbangkan komponen biaya lain yang harus dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan dalam proses tes.

"Pemerintah seharusnya memberi subsidi atas kelebihan biaya yang dikeluarkan fasilitas kesehatan. Kemudian pemerintah juga harus menjamin tersedianya alat tes dengan harga terjangkau dan valid hasilnya untuk menekan biaya.



Jika ada produksi dalam negeri yang bagus, kenapa harus gunakan yang import?" lanjut politisi asal dapil Kokab Cirebon Indramayu ini.

Selain itu Netty juga menyoroti minimnya peran pemerintah dalam memastikan kualitas penatalaksanaan rapid test di pusat-pusat pelayanan kesehatan.

"Upaya mengendalikan tarif rapid test harus diikuti dengan mengencangkan pengawasan agar alat tes benar-benar valid, akurat dan berkualitas. Pastikan akurasi alat test dan bahannya serta harus dilakukan oleh tenaga kesehatan," kata Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI ini.

Terkait info maraknya penjualan alat rapid test melalui online, Netty mengingatkan pemerintah agar menertibkan

penjualan secara bebas di lapak online.

"Perlu ditertibkan agar tidak merugikan masyarakat. Kita tidak tahu bagaimana standar akurasi, dari mana sumbernya. Lebih baik masyarakat melakukan tes di fasilitas kesehatan resmi yang melayani permintaan rapid test," jelasnya.

Netty meminta pemerintah makin sigap melakukan upaya terobosan penanganan Covid-19 mengingat lonjakan kasus baru yang telah menembus rekor di atas 2000 per hari.

"Saya melihat masyarakat makin banyak mendatangi pusat keramaian, mengabaikan penggunaan masker, dan berperilaku seolah Indonesia sudah aman dari ancaman Covid-19. Saya berharap ini tidak jadi petaka," tandasnya.

# Gratisan Biaya Rapid Test bagi Warga Kurang Mampu

“Harus ada formulasi aturan agar masyarakat berpenghasilan rendah, rentan miskin dan tidak mampu dapat menjalani rapid test dengan biaya ditanggung pemerintah. Apalagi dengan konsep new normal yang terus digalakkan, kebutuhan masyarakat akan surat keterangan bebas Covid-19 sebagai syarat bepergian dengan transportasi umum tentu makin tinggi.

**Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si.**

Anggota Komisi IX DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

## Positif Covid-19 Tembus Rekor

# Mufida: Protokol Baru dan Anggaran Harus Tersedia

Pemerintah perlu mengencangkan kembali aturan sebab kebijakan pemerintah untuk pencegahan penularan ini semakin tidak jelas setelah kampanye new normal dengan hasil lonjakan kasus rata-rata naik lebih dari 1.000 per hari

### Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyampaikan keprihatinannya atas munculnya klaster baru dengan 1.262 kasus positif Covid-19 di Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat (Secapa TNI AD) di Kota Bandung, Jawa Barat.

Temuan klaster baru ini sekaligus menandai rekor penambahan kasus harian Covid-19 terbanyak sejumlah 2.657 kasus pada 9 Juli 2020. Penambahan kasus pada 9 Juli 2020 membuat akumulasi kasus Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 70.736.

Mufida menyebut semakin meluasnya temuan kasus Covid-

19 dalam sehari dan secara akumulasi mengarah pada dugaan kuat WHO jika Covid-19 bisa menular melalui udara adalah pertanda kita harus meningkatkan kewaspadaan lebih tinggi.

Politisi PKS ini kemudian meminta pemerintah kembali mempertimbangkan opsi pembatalan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena banyak komponen masyarakat belum bisa menjalankan norma adaptasi kebiasaan baru dengan baik. Pemerintah juga belum secara tegas mengawal penerapan norma2 baru di masa Pandemi ini.

"Perlu protokol

pengecangan baru karena WHO menyebut Covid-19 sudah bisa menular lewat udara. Protokol yang lama tentu harus berubah. Pemerintah perlu mengencangkan kembali aturan sebab kebijakan pemerintah untuk pencegahan penularan ini semakin tidak jelas setelah kampanye new normal dengan hasil lonjakan kasus rata-rata naik lebih dari 1.000 per hari," papar Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/7/2020).

Mufida meminta pemerintah untuk terus menyiapkan faskes untuk menampung warga yang teridentifikasi positif, termasuk menyiapkan tempat-tempat isolasi mandiri bagi yang teridentifikasi positif, namun tidak memerlukan perawatan, dan meningkatkan kerja laboratorium dalam percepatan hasil test swab.

"Semakin banyak ditemukan kasus Orang Tanpa Gejala, sehingga Protokol Kesehatan baru harus segera dibuat, disosialisasikan dan disiplin diterapkan dengan pengawasan ketat," kata Mufida.

Mufida secara khusus kembali meminta pemerintah



melanjutkan dan meningkatkan pemeriksaan dengan rapid test maupun PCR massal untuk mendeteksi Orang Tanpa Gejala (OTG) kemudian melakukan tracing dan melakukan langkah-langkah pencegahan penularan.

"Kami juga mengajak masyarakat agar semakin waspada, tidak euforia dengan pembertakuan New Normal, karena sampai sekarang Pandemi masih di depan mata. Terapkan pola hidup bersih, selalu cuci tangan, memakai masker jika keluar rumah, hindari kerumunan, tidak keluar rumah jika tidak sangat perlu," ungkap Mufida.

Mufida juga mengingatkan pemerintah tidak hanya mengumbar sengkabut saja anggaran

penanganan Covid-19 yang sangat lambat turun. Ia menunggu realisasi janji-janji kabinet dan Presiden Joko Widodo soal percepatan pencairan anggaran yang jadi evaluasi besar pemerintah. Anggaran harus dijamin tersedia, dicairkan dan benar2 dialokasikan untuk penanganan Covid 19 secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

"Jika sudah menembus 70 ribu kasus dan terus bertambah tidak bisa tidak harus ada ketersediaan anggaran yang cepat dalam penanganan Covid-19 dan tolong juga alokasikan penganggaran untuk penelitian penemuan vaksin Covid-19," ujarnya.

# Kemenaker Diminta Siapkan Tenaga Kerja yang Dukung Proyek Prioritas Nasional

Kemenaker perlu melakukan koordinasi lintas instansi terkait pengawasan pelaksanaan relaksasi kebijakan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha sehingga tidak terjadi PHK bagi pekerja.

## H. ANSORY SIREGAR, Lc,

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

Komis IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker RI) untuk mempersiapkan tenaga kerja guna mendukung proyek-proyek prioritas nasional, proyek padat karya, wirausaha, dan tenaga kerja pendamping melalui lembaga pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah dan swasta.

"Kami meminta langkah strategis pemerintah untuk mempersiapkan tenaga kerja guna mendukung proyek strategis nasional," ungkap Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah

dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto di Gedung Nusantara 1, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Sementara, dalam upaya pemulihan ekonomi, Ansory meminta Kemenaker lebih berorientasi pada perlindungan pekerja sektor informal dan perluasan kesempatan kerja. Komisi IX DPR RI juga mendesak Kemenaker untuk meningkatkan pelatihan vokasi bagi pekerja yang terdampak Covid-19 dalam program Kartu Prakerja dan program-program pelatihan yang lain di kemena-

ker. Selain meningkatkan pelatihan, Kemenaker juga diminta membuat kebijakan dalam perlindungan pekerja.

"Salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 untuk melakukan PHK dan memarahkan pekerja. Serta meminta pengusaha tetap memberikan hak normatif pekerja sebagaimana ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS ini).

Untuk itu, lanjut Ansory, Kemenaker perlu melakukan koordinasi lintas instansi terkait pengawasan pelaksanaan relaksasi kebijakan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha sehingga tidak terjadi PHK bagi pekerja. "Membuat kebijakan percepatan penciptaan lapangan kerja berbasis UMKM serta mengupayakan pencegahan penyebaran dan penanganan kasus Covid-19 di lingkungan kerja dan melaksanakan perlindungan



pengupahan,"katanya.

Sementara untuk BPJS Ketenagakerjaan, Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah untuk membebaskan pajak pengambilan dana Jaminan Hari Tua (JHT) bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan juga didesak untuk melakukan terobosan kemudahan dalam memperoleh bantuan pembiayaan

perumahan bagi peserta program JHT BPJS Ketenagakerjaan. "Sehingga memberikan kepastian atau jaminan bagi peserta program JHT BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat memiliki rumah," tegas Ansory. (rnm/sf)

# Webinar

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



# PRESTASI & KESEJAHTERAAN ATLET

*Dalam Desain Sistem Keolahragaan Nasional*

KEYNOTE SPEECH

**Dr. H. Jazuli Juwaini, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI



NARASUMBER

**H. Mustafa Kamal, S.S**  
Anggota Komisi X DPR RI  
*Desain Kebijakan dan Strategi Implementasi  
Prestasi Serta Kesejahteraan Atlet*



**Dr. H. Zainudin Amali, SE., M.Si**  
Menteri Pemuda & Olahraga RI  
*Kebijakan Pemerintah dalam Merumuskan  
Skema Pendanaan Keolahragaan Nasional*



**Banyu Trimulyo**  
Atlet Berprestasi,  
Penyandang Disabilitas  
*Berprestasi ditengah Keterbatasan Fasilitas*



**Ponaryo Astaman (APPI)**  
Presiden APPI  
*Profesionalitas, Prestasi, dan  
Kesejahteraan Atlet*

**KAMIS** 16 Juli 2020  
pk. 13.30 WIB  
s.d Selesai

**Live Virtual:**  
Facebook dan Youtube  
Fraksi PKS DPR RI



Sekolah dan Kampus Swasta mulai  
'Angkat Bendera Putih',

# Fikri Faqih: Khawatir IPM Jeblok

Sejak awal digelontorkan Rp. 405,1 T dana Covid, coba liat berapa untuk mendukung daya beli dan ekonomi, sementara pendidikan tidak menjadi konsen kebijakan

**Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM**

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Semarang (07/07) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih mengkhawatirkan merosotnya angka indeks pembangunan manusia (IPM) menyusul kondisi Pendidikan swasta di tanah air yang mulai angkat bendera putih menghadapi dampak pandemi.

"Bila sekolah dan kampus swasta banyak yang tutup, maka yang terimbas lebih jauh ya IPM bisa jeblok," katanya di Semarang, Selasa (07/07).

Fikri menyinggung soal mulai 'menyerah'-nya sebagian sekolah dan kampus swasta di tanah air akibat dampak dari lamanya pandemi Covid-19 berlangsung

"Ada info dari sekolah maupun kampus di dapil saya, bahwa kemampuan mereka membiayai operasional hanya sampai Agustus ini, sisanya bergantung pada jumlah siswa dan mahasiswa baru yang mendaftar," imbuh politisi PKS ini.

Dampak pandemi secara luas turut menyapu berbagai sektor ekonomi, sehingga berdampak pula pada kemampuan daya beli masyarakat, termasuk untuk biaya Pendidikan.

"Membayar SPP saja sulit, apalagi untuk membayar uang pangkal seperti yang biasa diterapkan pada siswa dan mahasiswa baru di Pendidikan swasta," katanya.

Sehingga, Fikri menduga

angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni Pendidikan swasta di berbagai jenjang, termasuk perguruan tinggi akan menurun.

"Bila tidak ada yang mendaftar, pilihan berat lainnya adalah menutup sekolah atau kampus," ujarnya.

Problem menurunnya angka partisipasi penduduk dalam mengikuti program Pendidikan, tentunya akan berdampak signifikan dalam angka indeks pembangunan manusia (IPM). Sedangkan, tiga dimensi dasar dalam menentukan IPM adalah (1) kesehatan, (2) Pendidikan, dan (3) daya beli.

Fikri mengkritik pendekatan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 yang dinilai terlalu mementingkan komponen ketiga, yakni daya beli masyarakat.

"Sejak awal digelontorkan Rp. 405,1 T dana Covid, coba liat berapa untuk mendukung daya beli dan ekonomi, sementara pendidikan tidak menjadi konsen kebijakan," paparnya.



Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan peraturan pengganti UU (Perppu) yang kini disahkan menjadi UU nomor 2 tahun 2020.

Perppu tersebut dijadikan dasar hukum untuk mengeluarkan anggaran penanganan dampak pandemi Covid sebesar Rp. 405,1 T. Rinciannya, Rp. 75 T untuk kesehatan, Rp. 110 T untuk jaring pengaman sosial, Rp. 70,1 T untuk insentif

perpajakan, serta Rp. 150 T untuk program pemulihan ekonomi nasional.

Kementerian Keuangan bahkan menaikkan kembali anggaran Covid tersebut hingga tiga kali. Pertama naik menjadi Rp. 677,2 T pada 3 Juni, kemudian naik lagi menjadi Rp. 695,2 T pada 16 Juni, dan terakhir naik menjadi Rp. 905,1 T pada 19 Juni.

# Rapat Bersama Menkeu dan Gubernur BI, Anis Soroti Beban BI dalam Skema Burden Sharing



**Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si.**  
Anggota Komisi XI DPR RI

Selain dari operasi moneter melalui quantitative easing yang sesuai dengan skema burden sharing, dimana BI menanggung beban Covid-19 untuk public good sebesar Rp 397,60 triliun, BI juga akan menanggung beban bunga hutang sebesar Rp 35,9 triliun serta ditambah remunerasi sebesar Rp 1,1 triliun.

Sehingga sharing beban bunga BI sebesar Rp 37,0 triliun atau 54,8% dari total beban bunga sebesar 67,6%. Ini berarti beban bunga yang ditanggung BI jauh lebih besar dari yang ditanggung pemerintah.

“Bagaimana pendapat BI terkait analisis skema burden sharing yang memberikan beban kepada BI jauh lebih besar dibanding beban pemerintah atas bunga hutang?,” ujar Anis.

---

**Burden Sharing** Adalah skema menanggung beban bersama antara pemerintah, yakni Menteri Keuangan sebagai otoritas fiskal, dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter guna memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional karena dampak Covid-19.

## Rapat Bersama Menkeu dan Gubernur BI

# Anis Soroti Beban BI dalam Skema Burden Sharing

“Bagaimana pendapat BI terkait analisis skema burden sharing yang memberikan beban kepada BI jauh lebih besar dibanding beban pemerintah atas bunga hutang ?

**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si**

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (08/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, meminta klarifikasi dan konfirmasi mengenai beberapa hal dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang menindak lanjuti Surat Menteri Keuangan terkait Perkembangan Skema Burden Sharing (berbagai beban) Pembiayaan PEN di Jakarta, Senin (06/07/2020).

Hal pertama yang disampaikan Politisi Senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini adalah tentang kebijakan BI melalui quantitative easing dengan penambahan likuiditas perbankan yang mencapai Rp. 614,8 triliun.

Menurut Anis, di lapangan hal ini dinilai belum efektif karena likuiditas tersebut kembali

lagi ke pemerintah atau dengan kata lain tidak tersalurkan ke sektor riil.

Kemudian lanjut Anis, dengan penurunan BI7DRR sebesar 75 bps, juga tidak bertransmisi secara optimal pada suku bunga kredit perbankan.

“Bagaimana pandangan Bank Indonesia terkait dengan hal ini ?” tanya Anis dihadapan Gubernur BI.

Legislator Fraksi PKS ini menggaris bawahi beban BI yang jauh lebih besar dari beban pemerintah dalam skema burden sharing.

Selain dari operasi monetar melalui quantitative easing yang sesuai dengan skema burden sharing, dimana BI menanggung beban Covid-19 untuk public good sebesar Rp

397,60 triliun, BI juga akan menanggung beban bunga hutang sebesar Rp 35,9 triliun serta ditambah remunerasi sebesar Rp 1,1 triliun.

Sehingga sharing beban bunga BI sebesar Rp 37,0 triliun atau 54,8% dari total beban bunga sebesar 67,6%. Ini berarti beban bunga yang ditanggung BI jauh lebih besar dari yang ditanggung pemerintah.

“Bagaimana pendapat BI terkait analisis skema burden sharing yang memberikan beban kepada BI jauh lebih besar dibanding beban pemerintah atas bunga hutang ?,” ujar Anis.

Selain itu, Anis mendorong agar BI memiliki skema alternatif burden sharing yang efektif dan turuk.

“Yang resikonya di luar dari skema-skema yang telah menjadi pembahasan dengan Menteri Keuangan” ungkapnya.

Sebagai informasi, meningkatkan defisit yang sangat besar untuk penanganan Covid-19, membuat pemerintah melakukan burden sharing bersama BI.

Dalam Perpres 72 Tahun



2020, pemerintah menargetkan defisit anggaran Rp1.039,2 triliun atau 6,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sehingga ada tambahan defisit Rp732 triliun dari semula dalam APBN 2020 yang sebesar Rp307,2 triliun.

Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah memerlukan pembiayaan utang sebesar Rp903,46 triliun. Bunga inilah yang akan ditanggung bersama antara pemerintah dan BI.

Dari angka tersebut pembiayaan yang bersifat public goods seperti kesehatan, perlindungan sosial, sektoral, kementerian lembaga, dan pemda sebesar Rp397,6 triliun. Sementara yang bersifat non public goods seperti UMKM, korporasi non UMKM, dan lainnya senilai

Rp 505,86 triliun.

Adapun skema burden sharing yang disepakati dibagi atas empat kelompok. Kelompok pertama, public goods, bunganya akan 100% ditanggung BI.

Kedua, kelompok non-public goods untuk UMKM beban bunganya akan ditanggung pemerintah menggunakan BI reverse repo rate dikurangi diskon 1%. Skema ketiga ialah kelompok non-public goods korporasi non UMKM, beban bunganya akan ditanggung pemerintah menggunakan BI reverse repo rate.

Selanjutnya, skema terakhir ialah non-public goods lainnya akan ditanggung beban bunganya 100% oleh pemerintah.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

# GKSB DPR RI Dukung Langkah Fatah dan Hamas Bersatu Hadapi Aneksasi Israel

Indonesia 350 tahun dijajah, ternyata kemerdekaan itu kita dapatkan ketika kita bersatu. Walaupun kita terdiri dari berbagai suku dan bangsa, tetapi ketika kita menyatu itu menjadi kekuatan

**H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.**

Ketua GKSB DPR RI untuk Palestina

# GKSB DPR Dukung Langkah Fatah dan Hamas Bersatu Hadapi Aneksasi Israel

Indonesia 350 tahun dijajah, ternyata kemerdekaan itu kita dapatkan ketika kita bersatu. Walaupun kita terdiri dari berbagai suku dan bangsa, tetapi ketika kita menyatu itu menjadi kekuatan

## H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.

Ketua GKSB DPR RI Untuk Palestina

Jakarta (11/07) — Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI untuk Palestina mendukung langkah faksi Hamas dan Fatah untuk bersatu melawan aneksasi Israel atas tanah Palestina.

Hal itu disampaikan oleh Ketua GKSB DPR RI untuk Palestina, Syahrul Aidi usai melakukan pertemuan dengan Dubes Palestina untuk Indonesia, Jumat (10/07/2020).

"GKSB DPR RI mendukung langkah Fatah dan Hamas yang bersatu melawan aneksasi Israel atas tanah Palestina. Langkah tersebut merupakan langkah maju bagi Palestina

untuk mewujudkan negara Palestina yang berdaulat ke depannya," terang Syahrul Aidi dihadapan wartawan.

Dukungan GKSB itu merupakan reaksi atas informasi yang disampaikan oleh Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun, saat pertemuan tersebut yang menyebut faksi Hamas dan faksi Fatah telah bersepakat untuk bersatu melawan rencana Israel mencaplok Tepi Barat.

Zuhair mengatakan baru-baru ini kedua faksi bertemu. Mereka menyepakati kerja sama untuk melawan upaya Israel menguasai Yerusalem

tersebut.

"Beberapa hari lalu telah diadakan join conference yang dihadiri beberapa perwakilan Fatah dan Hamas untuk membuat join statement ataupun pernyataan bersama untuk menolak rencana aneksasi ini," kata Zuhair. Zuhair menyampaikan masalah utama saat ini bukan lagi perseteruan antara Hamas dan Fatah. Sebab keduanya sama-sama tegas menolak aneksasi Palestina.

"Permasalahan sesungguhnya bukan antara Hamas dan Fatah, tapi permasalahan sesungguhnya adalah penjajahan Israel," tuturnya.

Syahrul Aidi Ma'azat juga mengapresiasi langkah dua faksi itu. Dia berharap kesepakatan dua faksi itu bisa jadi awal yang baik. Dia mengenang bagaimana Indonesia memulai kemerdekaan dengan menyatukan berbagai kelompok yang berbeda.

"Indonesia 350 tahun



dijajah, ternyata kemerdekaan itu kita dapatkan ketika kita bersatu. Walaupun kita terdiri dari berbagai suku dan bangsa, tetapi ketika kita menyatu itu menjadi kekuatan," ujar Syahrul.

Sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia, posisi Palestina semakin terancam usai Israel mengumumkan rencana pencaplokan Tepi Barat. Rencana itu telah disampaikan

oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Pencaplokan Tepi Barat Palestina tak terlepas dari proposal perdamaian yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. AS mendukung Yerusalem menjadi Ibu Kota Israel, sedangkan Palestina menguasai sebagian kecil Tepi Barat.

## Sambut Pengembalian Fungsi Hagia Sophia Jadi Masjid

# Aleg PKS: Itu Hak Pemerintah Turki!

Status Hagia Sophia merupakan aset pribadi Sultan Muhammad Al-Fatih yang membelinya dengan uang pribadi dari beberapa pemuka nasrani pasca pembebasan konstantinopel tahun 1453 dan diwakafkan sebagai masjid. Namun, pada tahun 1934, oleh Attaturk, pemimpin Pemerintahan Turki sekuler, Masjid Hagia Sophia diubah menjadi museum secara ilegal.

### Dr. KH SURAHMAN HIDAYAT, M.A.

Anggota BKSAP DPR RI

Jakarta (13/07) — Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Surahman Hidayat, menyambut bahagia atas pengembalian fungsi Hagia Sophia menjadi masjid.

Surahman berpendapat Dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terkait pengembalian status dan fungsi Hagia Sophia sebagai Masjid dan mengu-

mumkannya terbuka untuk pelaksanaan sholat Jumat pada (24/07/2020) mendatang merupakan hak prerogatif Pemerintah Turki.

"Beberapa negara yang keberatan dan mengkritik Presiden Erdogan, seharusnya juga memahami bahwa pengembalian fungsi Hagia Sophia menjadi Masjid merupakan hak prerogatif Pemerintah Turki," kata Surahman.

Surahman Hidayat juga berbagi sedikit fakta sejarah tentang bangunan Hagia Sophia yang menurutnya perlu diluruskan.

"Status Hagia Sophia merupakan aset pribadi Sultan Muhammad Al-Fatih yang membelinya dengan uang pribadi dari beberapa pemuka nasrani pasca pembebasan konstantinopel tahun 1453 dan diwakafkan sebagai masjid. Namun, pada tahun 1934, oleh Attaturk, pemimpin Pemerintahan Turki sekuler, Masjid Hagia Sophia diubah menjadi museum secara ilegal," tutur Surahman.

Surahman juga membela sikap Presiden Recep Tayyip Erdogan yang terkesan cuek terhadap kritik negara-negara Barat terkait pengembalian fungsi Hagia Sophia menjadi Masjid.

"Sejak tahun 1453 Hagia Sophia sudah berfungsi sebagai masjid, Dekrit Pemerintah Turki saat ini hanya mengembalikan Hagia Sophia ke fungsi semula sebagai Masjid. Menunaikan amanah wakil Sultan Muhammad Al-Fatih atas Hagia Sophia," tegas Surahman.

Anggota DPR Dapil Jawa Barat X ini bersyukur pada waktu yang tepat, Majelis Daulah semacam Mahkamah Teringgi Turki, mengabulkan judicial review yg diajukan oleh komunitas muslimin Turki. Membatalkan putusan Attaturk dan mengembalikan fungsinya sebagai masjid.



"Jadi, pengembalian fungsi Hagia Sophia yang dilakukan oleh Presiden Erdogan merupakan upaya pelurusan sejarah di Turki dan keputusan tersebut merupakan hak berdaulat dari Pemerintah Turki terhadap aset negara yang dimilikinya," tegas Surahman.

Surahman menyampaikan bahwa Presiden Erdogan, dalam pidato Dekritnya, menegaskan bahwa manajemen Masjid akan terbuka melayani muslimin dan juga non muslim yang datang berziarah atau berkunjung ke

Hagia Sophia. Bahkan dihapuskan status Hagia Sophia sebagai museum berarti dihapuskan tiket masuk, sehingga siapapun dapat masuk ke dalam Masjid Hagia Sophia.

"Jadi, terkait dekrit pengembalian fungsi Hagia Sophia menjadi Masjid, semua orang harus menghormati sistem dan otoritas hukum Turki, kedaulatan internal Turki dan sejarah panjang bangsa Turki," pungkas Surahman mengakhiri.

Rapat BAKN dengan YLKI, Organda dan MTI,

# Syaikhu Tanyakan Efektifitas Subsidi Energi

"Apakah subsidi sudah memadai dan bagaimana organda melakukan pengawasan terhadap anggota yang menyalahgunakan subsidi?" "Seberapa banyak dan sering YLKI dapat pengaduan serta seputar apa keluhan yang diterima dari masyarakat?"

## H. AHMAD SYAIKHU

Wakil Ketua BAKN DPR RI

Jakarta (07/07) — Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Syaikhu mempertanyakan efektifitas subsidi energi dalam rapat di DPR, Senin, (06/07/2020).

Syaikhu bertanya soal tersebut kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), DPP Organda dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Pimpinan ketiga organisasi tersebut hadir dalam rapat yang dipimpin Syaikhu.

Politisi PKS itu bertanya kepada Organda soal efektifitas subsidi energi. Juga tentang pengawasan jika ada penyalahgunaan.

"Apakah subsidi sudah memadai dan bagaimana organda melakukan pengawasan terhadap anggota yang menyalahgunakan subsidi?" tanya Syaikhu.

Kepada YLKI, Syaikhu menyinggung soal pengaduan-pengaduan atau keluhan dari masyarakat.

"Seberapa banyak dan sering YLKI dapat pengaduan serta seputar apa keluhan yang diterima dari masyarakat?" tanya Syaikhu.

Kemudian kepada MTI, mantan Wakil Walikota Bekasi itu bertanya tentang reformulasi yang tepat agar subsidi bisa efektif dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pengguna

transportasi.

"Apakah pola pemberian subsidi sudah efektif? Jika belum bagaimana reformulasi yang lebih tepat?" tanya Syaikhu.

Syaikhu menyoroti subsidi energi berupa gas dan BBM, sebab di Indonesia, dalam satu dekade terakhir mencapai angka lebih dari seratus triliun rupiah setiap tahunnya.

Bahkan, lanjut Syaikhu, pada tahun 2014 angka subsidi energi mencapai angka Rp 246,5 triliun atau 2,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau setara dengan belanja di lebih 5 kementerian lembaga.

BAKN sendiri sejak dua pekan lalu mengundang pihak terkait untuk mendapatkan masukan soal subsidi energi ini. Diharapkan, ke depannya subsidi BBM dan gas akan tepat sasaran dan berkurangnya penyalahgunaan.





**KH Tengku Zulkarnain**

@ustadtengkuzul



**Berita di Media PKS Menerima RUU HIP dengan Catatan, Padahal kenyataannya PKS MENOLAK dengan Catatan. Ini Kiriman Teman Kopi Surat PKS tentang RUU HIP. Terima Kasih PKS. Anda Tidak Mengecewakan Kami Umat Islam. Berjuang Terus Bersama Umat. Salam Perjuangan... @hnurwahid2**

Berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Tentang Haluan Ideologi Pancasila, dengan memohon taufik dan Ridho dari Allah SWT dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyatakan MENOLAK dengan catatan Rancangan Undang-Undang Tentang Haluan Ideologi Pancasila untuk ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR sebelum RUU ini mengakomodir terlebih dahulu ketentuan terkait dengan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang

Wakil Ketua MUI Pusat KH. Tengku Zulkarnain mendukung sikap Fraksi PKS yang Menolak RUU HIP. Bahkan beliau turut membantah informasi yang tidak benar tentang sikap Fraksi PKS. Terimakasih ustadz.



# Anggota Baleg FPKS Minta Presiden Terbitkan Surat Presiden terkait RUU HIP

“Semestinya Pemerintah bersikap lugas dan aspiratif, tidak harus menunggu jatuh tempo terhadap RUU HIP yang sudah sangat luas mendapat penolakan publik ini

## Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota BALEG DPR RI

Jakarta (13/07) — Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta Presiden segera menerbitkan Surat Presiden (Surpres) terkait RUU HIP.

Surpres ini, kata Mulyanto, penting segera diterbitkan untuk mengakhiri simpang-siur sikap Pemerintah terhadap RUU HIP.

Mulyanto menyebut untuk menerbitkan Surpres tersebut Presiden tidak harus menunggu jatuh tempo pada (20/7/2020), mengingat aspirasi penolakan masyarakat sudah sangat meluas.

“Kini bola RUU HIP ini ada di istana bukan di Senayam lagi,” tukas anggota Baleg DPR

RI ini.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menjelaskan, sesuai UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka paling lama 60 hari sejak itu.

“Presiden sudah harus membuat Surat Presiden (Surpres) tentang penunjukan Menteri yang mewakilinya dalam pembahasan RUU HIP serta DIM (daftar inventarisasi masalah), yang diperkirakan jatuh pada tanggal 20 Juli 2020,” ungkap Mulyanto.

Tapi sampai hari ini, kata Mulyanto, Presiden belum mengirimkan Surpres tersebut ke DPR. Bahkan saat bertemu dengan pimpinan Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (08/07/2020) Presiden Jokowi menegaskan pemerintah masih mengkaji RUU HIP tersebut.

“Jadi tidak benar kalau ada Menteri yang bilang Pemerintah menunda apalagi menolak RUU HIP ini. Itu hanya statemen PHP, lips servis, yang tidak berdasar. Nyatanya, Presiden mengakui sendiri belum mengambil sikap apa-apa,” jelas Mulyanto.

“Semestinya Pemerintah bersikap lugas dan aspiratif, tidak harus menunggu jatuh tempo terhadap RUU HIP yang sudah sangat luas mendapat penolakan publik ini: mulai dari MU dan ormas-ormas Islam besar; para tokoh agamawan; para tokoh purnawirawan TNI-Polri; para cerdik-cendekia akademisi pengajar Pancasila; para Guru Besar yang tergabung dalam Forum Rektor Indonesia; ormas-ormas kepemudaan, keagamaan maupun kebangsaan; para tokoh dan ulama di berbagai daerah,” tandas Mulyanto.



Mulyanto mengajak dalam kondisi pandemi Covid-19, Pemerintah dan masyarakat untuk fokus berkonsentrasi pada upaya penanggulangan musibah ini. Bukan yang lain.

Jangan ganggu fokus penanggulangan covid-19 ini dengan hal-hal yang tidak penting dan mendesak. Apalagi kalau sampai memaksa masyarakat demo turun ke jalan secara bergerombol untuk menyampaikan aspirasi lagi.

“Ini akan makin mempersulit upaya penanggulangan pandemi yang tengah kita hadapi,” tegas Mulyanto.

Aspirasi penolakan masyarakat terhadap RUU HIP ini, imbuhnya, sudah disampaikan secara luas dan mendalam. Tinggal kemauan Pemerintah untuk bersikap tegas dan formal. Tidak plin-plan atau mengulur waktu.

“Kita harus sama-sama menjaga, agar pandemi Covid yang diiringi dengan pandemi ekonomi ini, tidak meningkat menjadi pandemi politik. Pandemi multidimensi seperti ini harus kita cegah,” tukas anggota Badan Legislatif DPR RI ini.

## RUU Redenominasi masuk Prolegnas 2020-2024

# Anis Minta Pemerintah Prioritas Tangani Dampak Covid-19

Diantara nilai manfaat dari redenominasi, yaitu untuk kemudahan dan penyederhanaan sistem pencatatan keuangan bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Terutama soal kemudahan teknik perhitungan rupiah karena selama ini selalu melibatkan banyak digit yang berpotensi menyebabkan kesalahan dalam transaksi

### Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (11/07) — Rancangan Undang-undang Tentang Redenominasi Rupiah yang akan dilakukan Bank Indonesia telah masuk dalam list RUU long list 2019-2024 Prolegnas.

Anggota komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati mengatakan bahwa rencana redenominasi rupiah bukanlah wacana baru, karena pada tahun 2010, BI sudah merencanakan lima tahapan pelaksanaan redenominasi rupiah.

Di Jakarta, Rabu (8/7/2020), Anis menjelaskan beberapa nilai manfaat dari redenominasi, yaitu pertama

untuk kemudahan dan penyederhanaan sistem pencatatan keuangan bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

"Terutama soal kemudahan teknik perhitungan rupiah karena selama ini selalu melibatkan banyak digit yang berpotensi menyebabkan kesalahan dalam transaksi. Khusus bagi pemerintah akan mempermudah penyusunan APBN yang nilainya saat ini sudah mencapai ribuan triliun rupiah," urainya.

Kedua, lanjut Anis, meningkatkan citra rupiah terhadap mata uang negara lain. Nilai

tukar rupiah terhadap dolar AS kuotasinya akan sama dengan mata uang di negara lain.

Namun demikian, Anis juga menjelaskan bahwa redenominasi pasti ada resikonya. "Ada persepsi dan kekhawatiran di masyarakat bahwa redenominasi rupiah sama dengan sanering. Dikhawatirkan banyak pemilik modal yang akan mengkonversikan uang rupiahnya kedalam valuta asing khususnya dolar AS," imbuhnya.

Padahal menurut Anis, kedua kebijakan itu berbeda. Redenominasi hanya mengurangi jumlah digit tanpa mengurangi nilai uangnya. Sementara sanering adalah mengurangi daya beli dan nilai uangnya.

Resiko lain terkait potensi kenaikan harga karena pembulatan harga ke atas secara berlebihan akibat dari pengusaha dan pedagang yang menaikkan harga semauanya. Anis menegaskan resiko saat pelaksanaan redenominasi harus diantisipasi.

"Untuk mengatasi resiko saat pelaksanaannya, diperlukan landasan hukum yang kuat dan dukungan



masyarakat," ungkapnya.

Karena itu tambah Anis, harus ada sosialisasi dan edukasi secara aktif, intensif dan berkesinambungan kepada masyarakat tentang apa itu redenominasi.

Hal lain yang sangat diperlukan dalam pandangan Anis adalah kerja sama yang baik antara pemerintah, BI dan OJK serta didukung perbankan, asosiasi industri dan

pengusaha, lembaga pendidikan serta lembaga masyarakat lainnya.

Menjawab pertanyaan kapan waktu terbaik memulai pembahasan redenominasi rupiah ini, Anis menekankan bahwa sebaiknya pemerintah saat ini fokus menanganai pandemi Covid 19 dulu. "Masih banyak permasalahan penting lain yang harus dibenahi pemerintah," katanya mengakhiri.

# Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Target Pajak 2021

Pemerintah perlu mengevaluasi dampak insentif perpajakan supaya tidak berimplikasi pada tax ratio di tahun berikutnya dalam penetapan target pajak. Pemerintah juga perlu memperhatikan kebijakan sektoral dalam menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi

## H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si

Anggota Banggar DPR RI

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberi catatan kepada Pemerintah terkait dengan target penerimaan pajak pada tahun 2021. Berdasarkan catatan dari Panitia Kerja (Panja) Banggar yang dikemukakan oleh Anggota Banggar DPR RI Muhammad Nasir Djamil, Pemerintah perlu mengevaluasi dampak insentif perpajakan supaya tidak berimplikasi pada tax ratio di tahun berikutnya dalam penetapan target pajak.

"Pemerintah juga perlu memperhatikan kebijakan sektoral dalam menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi," ungkap Nasir saat rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani

Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monocarra, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Menurut politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Pemerintah juga perlu menyampaikan kendala yang dihadapi dengan jenderal pajak dalam membangun basis data dan sistem administrasi perpajakan core tax administration system serta sistem pendukung operasional administrasi perpajakan.

Selain itu, pihaknya juga meminta Pemerintah mempertimbangkan kembali

rencana menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun depan. Pasalnya, hal itu akan mempengaruhi industri maupun petani yang saat ini terdampak pandemi Covid-19. "Kami menyampaikan agar Pemerintah mempertimbangkan kembali mengingat keadaan sedang pandemi Covid-19 yang tentu berpengaruh terhadap kehidupan petani tembakau," katanya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani indrawati mengatakan bahwa salah satu tantangan terberat dalam melakukan perkiraan target perpajakan tahun 2021 adalah ketidakpastian dan dinamika perekonomian tahun 2020 yang menjadi baseline perhitungan target perpajakan.

Dengan tingginya risiko tersebut, penyusunan target penerimaan perpajakan tahun 2021 akan mempertimbangkan dua faktor, yakni kinerja penerimaan 2020 dan besarnya insentif yang dikucurkan buat korporasi dan konglomerat pada tahun ini.

"Penghitungan ini menjadi baseline perhitungan penerimaan perpajakan tahun 2021 yang juga mencakup kebijakan insen-



tif perpajakan yang akan diberikan, dan strategi optimalisasi penerimaan yang akan dilakukan," kata Sri Mulyani. Mantan petinggi Bank Dunia ini juga menekankan bahwa kebijakan perpajakan 2021 diarahkan antara lain pada pemberian insentif yang lebih tepat.

Selain itu, Pemerintah juga akan terus melakukan relaksasi ekonomi nasional, optimalisasi penerimaan melalui perluasan basis pajak, serta peningkatan pelayanan kepastian dan ekstensifikasi barang kena cukai. "Konsistensi dalam melakukan reformasi perpajakan dan pemulihan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan rasio

perpajakan secara bertahap di masa yang akan datang," jelasnya.

Seperti diketahui, penerimaan pajak periode Januari Mei 2020 sebesar Rp 444,56 triliun. Dengan target APBN 2020 sebesar Rp 1.254,11 triliun, realisasi penerimaan pajak telah mencapai 35,45 persen dari target. Penerimaan pajak mengalami kontraksi seiring dengan mulai terhatinya dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian, sehingga bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 10,82 persen. (rnm/sf)



*Saudaraku*

*menurut Syaikh Mutawali Sya'rowi:  
"Harta adalah rizqi yang paling rendah, anak-anak sholeh adalah bentuk rizqi yang paling utama"*

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI



## Kunjungan Dapil di Purbalingga

# Rofik Letakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Quran

"Semoga bantuan ini bermanfaat, dan proses pembangunan Rumah Quran bisa segera selesai. Serta Keberadaan Rumah Quran As Syifa ini bermanfaat dan melahirkan generasi-generasi yang soleh/solehah yang mampu memahami dan mengamalkan isi Al Quran"

### H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

Purbalingga (05/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Jawa Tengah VII, Rofik Hananto, melakukan Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan di Purbalingga, Jawa Tengah.

Rofik hadir dalam acara peletakan batu pertama pembangunan Rumah Quran As Syifa di Desa Karangjambe, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga.

Rumah Quran As Syifa didirikan di atas tanah wakaf Almarhumah Bu Enis Yuniarsih. Acara ini juga dihadiri oleh Para Tokoh masyarakat dan

perangkat desa Karangjambe.

Kepala Desa Karangjambe, Sunardi mengucapkan terima kasih dengan pembangunan Rumah Quran As Syifa di desanya.

"Kami mengucapkan terima kasih atas proses pembangunan Rumah Quran di Desa Karangjambe, di tengah kemajuan teknologi saat ini, keberadaan Rumah Quran sangat penting," ujar Sunardi.

"Mudah-mudahan semua berjalan sesuai dengan rencana tanpa hambatan, dari proses pembangunan sampai dengan

pemanfaatnya," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rofik Hananto sangat menyambut baik keberadaan Rumah Quran As Syifa di Desa Karangjambe.

"Saya menyambut baik proses pembangunan Rumah Quran ini. Hari ini, kita menjadi saksi pembangunan peradaban, kita semua punya kesempatan agar Al Quran tersimpan dalam dada anak-anak kita," kata Rofik.

"Kami tidak ingin ketinggalan dengan momen yang sangat bagus ini, momen yang bisa menjadi batu pijakan kita untuk meraih kemuliaan Allah SWT Insya Allah bagi yang memberikan jalan, menyiapkan sarana berdirinya Rumah Quran As Syifa juga akan mendapatkan kebaikan, pahala yang besar dari Allah SWT," imbuhnya.

Rofik juga mendoakan khususnya untuk Almarhumah Bu Enis, Semoga Almarhumah dilapangkan kuburnya dan Rumah Quran ini menjadi amal jariah yang mulia.

Dalam kesempatan ini Rofik Hananto didampingi istri



memberikan bantuan uang tunai senilai 10 Juta Rupiah.

"Semoga bantuan ini bermanfaat, dan proses pembangunan Rumah Quran bisa segera selesai. Serta Keberadaan Rumah Quran As Syifa ini bermanfaat dan melahirkan generasi-generasi yang soleh/solehah yang mampu memahami dan mengamalkan isi Al Quran" Ucap Rofik

Perwakilan keluarga Bani Abdul Manan, Adhi Parjoto mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan dari Pak Rofik Hananto.

"Saya mewakili keluarga besar Bani Abdul Manan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan dukungan dari Pak Rofik Hananto, semoga ini menjadi amal jariah kita semua," imbuhnya mengakhiri.

## Bertemu Konstituen

# Nur Azizah Ajak Masyarakat Kembali pada Pemahaman dan Pengamalan Agama

Banyak aspirasi masyarakat soal penolakan terhadap RUU HIP, juga isu yang sempat ramai yakni adanya wacana penyederhanaan kurikulum 2013 dengan meleburkan beberapa mata pelajaran, dimana PPKN bakal dilebur dengan mata pelajaran agama menjadi Pendidikan Agama, Kepercayaan, dan Nilai-nilai Pancasila," urai Anggota Komisi VIII saat bertemu Konstituen.

Nur Azizah menambahkan walau belum sampai pada keputusan penetapan, beberapa isu dan wacana banyak ditentang oleh masyarakat.

"Meski memang bukan negara Agama, Undang-undang Dasar RI 1945 secara tegas dan jelas dalam alinea ke 4 juga serta Bab XI pasal 29 ayat 1 bahwa Negara kita berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa," tandas Nur Azizah.

Nur Azizah melanjutkan, Agama yang mengatur tatanan kehidupan dengan sempurna, wajib dan seharusnya mendapat porsi utama dalam pendidikan di semua jenjang mulai pra sekolah hingga sekolah tinggi.

## Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Bekasi (08/07) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Nur Azizah Tamhid mendengar keluhan masyarakat seputar penolakan RUU HIP, dalam kunjungan kerjanya ke Daerah Pemilihan Jabar VI di Bekasi, Jumat, (03/07/2020).

Menurut Nur Azizah, RUU HIP yang banyak menuai kecamatan dan penolakan

masyarakat, dipandang cenderung mengaburkan nilai murni Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara dalam kebhinekaan.

"Banyak aspirasi masyarakat soal penolakan terhadap RUU HIP, juga isu yang sempat ramai yakni adanya wacana penyederhanaan kurikulum 2013 dengan



"Dalam menghadapi carut marut problem yang sedang dihadapi saat ini, baik krisis akibat pandemic covid-19 dan lainnya, sudah seharusnya kita kembali bersungguh menjalankan nilai agama yang dimulai dari pribadi, keluarga dan masyarakat karena inilah kunci tercapainya kenyamanan hidup dunia dan akhirat," tegas Politisi perempuan Anggota Komisi VIII DPR RI ini.

Kunjungan dapil di Bekasi kali ini, Nur Azizah menyapa masyarakat wilayah Bekasi Timur bertempat di Kantor Dewan Pimpinan Cabang PKS Bekasi Timur yang berada di wilayah Kelurahan Aren Jaya, menemui tokoh masyarakat, Ketua penggerak PKK dan Tokoh Majelis Ta'lim.

## Kunjungan Dapil

# Bukhori Serahkan Bantuan APD ke IDI Jateng

“Pemberian paket APD ini sebenarnya tidak sebanding dengan pengorbanan para tenaga kesehatan. Bantuan ini kami berikan sebagai bentuk atensi dan empati kami terhadap perjuangan para tenaga kesehatan yang tengah berjuang menyelamatkan banyak nyawa dari ancaman Covid-19”

### KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Semarang (07/07) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyalurkan bantuan 50 set paket lengkap Alat Pelindungan Diri (APD) di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah I (Kota Semarang, Salatiga, Kabupaten Kendal, dan Semarang).

Bantuan tersebut salah satunya disalurkan ke Bukhori kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Jawa Tengah.

Selain disalurkan ke IDI Jateng, terdapat 10 puskesmas di Kabupaten Kendal, 5 puskes-

mas di Kota Semarang, khususnya yang memiliki fasilitas rawat inap serta sejumlah Rumah Sakit di dapil yang menjadi sasaran penyaluran bantuan.

Sebagai informasi, satu set komplet APD tersebut terdiri dari 9 item yang berisi antara lain; tutup kepala, kacamata pelindung, pelindung wajah, masker N95, baju APD, sarung tangan medis, sarung tangan karet, sepatu karet, dan handsanitizer 125 ml.

Selain itu, paket bantuan

APD tersebut ditambah dengan 100 setel baju hazmat, face shield, dan 57.000 buah masker

Dalam kesempatan tersebut, Bukhori menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada tenaga kesehatan atas dedikasi dan pengorbanan yang diberikan dalam menangani pasien Covid-19.

Sehingga, salah satu bentuk perhatian yang bisa diberikannya adalah dengan memberikan bantuan tersebut secara langsung seraya menyampaikan ucapan terima kasih kepada IDI selaku perwakilan dari para dokter.

“Pemberian paket APD ini sebenarnya tidak sebanding dengan pengorbanan para tenaga kesehatan. Bantuan ini kami berikan sebagai bentuk atensi dan empati kami terhadap perjuangan para tenaga kesehatan yang tengah berjuang menyelamatkan banyak nyawa dari ancaman Covid-19” ungkap Bukhori di acara serah terima bantuan bersama Ketua IDI Wilayah Jawa Tengah, Djoko Handoyo di Semarang, Senin (06/07/2020).

Bukhori menuturkannya, sejak awal dirinya telah fokus dengan isu Covid-19 sebelum terjadinya kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Dalam salah satu kesempatan diskusi yang diselenggarakan oleh salah satu media nasional pada 1 Maret 2020, Anggota Komisi VIII DPR ini sebelumnya telah



memperingatkan Pemerintah untuk lebih waspada dalam mengantisipasi penyebaran virus di Indonesia.

“Kritik dan saran sudah kami layankan bahkan sebelum virus masuk ke Indonesia. Namun karena tidak siap, akhirnya Pemerintah terkesan gagap karena tidak adanya kejelasan terkait roadmap penanganan sejak awal. Untungnya, bangsa kita memiliki umat yang mudah tersentuh sehingga tidak membiarkan pemerintah bekerja sendiri” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua IDI Wilayah Jawa Tengah Djoko Handoyo turut menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas bantuan yang diberikan.

Menurutnya, perhatian yang diberikan oleh Bukhori sangat bermanfaat dan

berharga bagi para dokter untuk menjalankan tugas pelayanan di masyarakat, khususnya di tengah kesulitan yang pernah dialami oleh para tenaga kesehatan dalam memperoleh APD.

“Ini adalah bantuan yang luar biasa karena perhatian dan semangat yang diberikan. Sejujurnya, sejak pertengahan Februari kami sulit memperoleh APD. IDI harus beli sendiri sampai sekian ratus juta, bahkan harus mencari sendiri juga sebelum akhirnya kami bisa peroleh di Solo.” ungkap Djoko.

Ketika disinggung terkait sejumlah parpol yang sudah memberikan bantuan ke IDI Jateng, Djoko menyampaikan bahwa sejauh ini baru PKS yang berkinerja dan memberikan bantuan ke IDI Jateng.

“Baru PKS yang berkinerja, yang lain (red: parpol) belum,” tukasnya

# Syahrul Aidi Fasilitasi Gubernur Riau Ekspose Wilayahnya di Gedung DPR

Alhamdulillah, hari ini (kemarin) rekan-rekan komisi V DPR RI mendengar langsung kondisi Riau langsung dari Gubernur. Kondisi-kondisi yang saya sebutkan selama ini telah mereka verifikasi, dan rekan-rekan memberi atensi atas beberapa issue seperti ancaman kedaulatan negara di pulau terluar

## H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.

Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta (10/07) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat memfasilitasi pertemuan antara Gubernur Riau dengan para anggota DPR RI Komisi V.

Kegiatan itu dimanfaatkan Gubernur Riau untuk menyampaikan berbagai usulan program strategis nasional di Riau ke Anggota DPR RI.

Kegiatan pertemuan antara Komisi V DPR RI dengan Gubernur Riau tersebut dilaksanakan pada Kamis

(9/6/2020). Syahrul Aidi memanfaatkan kesempatan tersebut dengan memperkenalkan Gubernur Riau, Syamsuar ke beberapa Anggota DPR RI.

Selain menjelaskan kondisi infrastruktur Riau secara umum, Gubernur Riau juga menjelaskan bahwa ada ancaman kedaulatan nasional di Provinsi Riau melalui garis perbatasan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia yang makin berkurang karena

adanya abrasi laut di 4 pulau terluar Indonesia.

"Ada empat pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang saat ini mengalami abrasi. Hingga mencapai 167 kilometer. Yaitu pulau Bengkalis, Rupat, Mandi dan Rangsang. Kita berharap ini sangat diperhatikan oleh pemerintahan pusat" kata Syamsuar di hadapan wartawan usai pertemuan.

Syahrul Aidi menambahkan bahwa dia saat ini fokus memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat Riau di bidang infrastruktur di Senayan. Salah satu usahanya ada menggelar kegiatan rapar dengar pendapat umum antara anggota Komisi V DPR RI dengan Gubernur Riau.

"Alhamdulillah, hari ini (kemarin) rekan-rekan Komisi V DPR RI mendengar langsung kondisi Riau langsung dari Gubernur. Kondisi-kondisi yang saya sebutkan selama ini telah mereka verifikasi, dan rekan-rekan memberi atensi atas



beberapa issue seperti ancaman kedaulatan negara di pulau terluar, potensi pariwisata dan beberapa infrastruktur jalan yang jadi prioritas. Ke depan, saya akan mengawal hasil pembicaraan ini dalam bentuk rapat dan tindak lanjut lainnya" tambah Syahrul Aidi di samping Gubernur Riau.

Syahrul Aidi juga menyampaikan bahwa RDPU antara kepala daerah dengan

Anggota Komisi V sangat jarang dilakukan.

Syahrul mengucapkan terima kasih anggota Komisi V sudah menyediakan waktunya. Apalagi di tengah penyebaran Pandemi Covid-19 saat ini.

Perlu dicatat, Syahrul Aidi juga pernah memboyong anggota Komisi V DPR RI dan Menteri PUPR ke Riau beberapa waktu lalu untuk melihat secara langsung kondisi Riau.

# BERITA FOTO



Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T

## Bantuan untuk Pegiat pariwisata dan ekonomi kreatif terdampak Covid-19

Bandung (12/7) — Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Ledia Hanifa Amalia melakukan kunjungan dilapil dengan menyerahkan bantuan untuk para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif terdampak covid. di Mako Sat Sabhara polrestabes Bandung (Ahad, 12 Juli 2020).

Kunjungan ini sekaligus dalam rangka memberi bantuan vitamin untuk Pak Polisi dan Bu Polisi yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.



## HARI ASPIRASI

# Aspirasi dari forum komunikasi Guru SPK Indonesia

Jakarta (28/06) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menerima aspirasi secara langsung dari Forum Komunikasi Guru SPK Indonesia di Ruang Aspirasi Fraksi PKS DPR RI pada Selasa 7 Juli 2020.

Pertemuan ini mengagendakan aspirasi tentang Kebijakan Kemendikbud tentang pencabutan tunjangan profesi bagi guru Satuan pendidikan kerjasama (SPK).





## HARI ASPIRASI

FRAKSI PKS DPR RI



# Aspirasi Virtual dari Fakultas Hukum UII Jogjakarta

Jakarta (28/06) - Fraksi PKS DPR RI menerima aspirasi secara virtual dari Fakultas Hukum UII Jogjakarta pada Selasa 7 Juli 2020. hadir dari Fraksi PKS Anggota DPR RI Dapil Jogjakarta Dr. Sukamta dan Anggota DPR RI dapil Jawa Tengah KH Bukhori Yusuf.

## PROFIL

### Dr. Abdul Kharis A, SE. M.Si.Akt



## MENJADIKAN KELUARGA UNTUK DAKWAH

Pekan ini kita berkenalan dengan Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah yaitu Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, dan Klaten. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, M.Si. Lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 25 Agustus 1968.

Seorang mubalig, pengusaha, dan politisi. Sempat sebagai dosen untuk Universitas Muhammadiyah

Surakarta sebelum memutuskan bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Abdul Kharis Almasyhari adalah putra pasangan Syaibani dan Muslimah. Dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama dengan ayah seorang kiai pemilik pondok pesantren di Purworejo.

Sembari ikut mengaji bersama santri-santri di pondok

pesantren ayahnya, Pak Kharis – sapaan akrabnya – melewati pendidikan formal di sekolah negeri. Prestasi cukup melekat, Pak Kharis pernah mengecap sebagai seorang siswa teladan se-Kabupaten Purworejo saat SD dan sering meraih juara kelas hingga SMA.

Pak Kharis menikah dengan Retno Sintawati, istri yang disuntingnya berasal dari

kota Tegal. Alhamdulillah telah dikaruniai putra 5 dan putri 2.

Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan Sakinah kepada keluarga pak Kharis.

Pesan pak kharis untuk keluarga Indonesia "Jadikan keluargamu sebagai keluarga dakwah, sehati meraih ridho ilahi "

”

Jadikan keluargamu sebagai keluarga dakwah, sehati meraih ridho ilahi

### SOCIAL MEDIA

Untuk mengetahui sepak terjang, Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, S.E., M.Si., AKT., CA. dapat mengikuti social media

Facebook : Sahabat Kharis  
Twitter : @AbdulKharisA  
Instagram : @sahabatkharis



Ketahui segala informasi  
terkini ikhtiar politik  
PKS di Parlemen

*Kunjungi*

# KANAL RESMI FRAKSI PKS DPR RI



Website  
[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)



Instagram  
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)



Twitter  
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)



Facebook  
Fraksi PKS DPR RI



Youtube  
PKSTV DPR RI

[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)